



RENCANA KERJA TAHUN 2024

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat





PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KESEHATAN

Jl. Pasteur No. 25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Telp : (022) - 4212800 - 4218372
Fax : (022) - 4236721 Website : www.diskes.jabarprov.go.id Email : diskес@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40171

KEPUTUSAN GUBERNUR

JAWA BARAT

Nomor : 18727/KS.01/SEKRE

TENTANG

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah no 87);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
 19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 6 tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 20. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 21. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024;
 22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 10639/KS.01/SEKRE Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat program, dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V Penutup

- KETIGA : Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 18 September 2023



dr. RADEN VINI ADIANI DEWI
Pembina Tingkat I
NIP. 197201162002122002

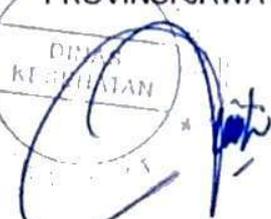


KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Rabb Semesta Alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Dokumen Renja ini dibuat sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang disesuaikan dengan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang terlibat di dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Jawa Barat


**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT**

dr. R. VINI ADIANI DEWI
Pembina Tingkat I
NIP. 197201162002122002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.....	19
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.....	21
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT.....	57
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.....	58
3.3 Program dan Kegiatan Prioritas.....	59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT	61
4.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	61
4.2 Program dan Kegiatan.....	63
4.3 Pendanaan.....	102
BAB V PENUTUP.....	103

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data capaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan sesuai tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2022 sehingga seluruh kebijakan, strategi dan program/kegiatan pembangunan bidang kesehatan tahun 2024 difokuskan pada pencapaian indikator kerja utama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2024-2026, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs;
19. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Peraturan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
22. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga;
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara pelayanan Publik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1447);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2010, Nomor 28 Seri E);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2014, Nomor 12 Seri E);

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
42. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ;
44. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Rumah Sakit Provinsi Jawa Barat;
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Tugas Pokok Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
46. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
47. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
48. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
49. Keputusan Gubernur Nomor 10639/KS.01/SEKRE Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2024 adalah sebagai acuan untuk:

- 1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 2) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKPJ);
- 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- 4) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian target kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian tersebut serta Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 sebanyak 5 program, 18 kegiatan, dan 158 sub kegiatan.
2. Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2022 dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.997.685.172.519,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.864.153.946.511,00 dengan persentase 93,32%.
3. Realisasi anggaran untuk menunjang Sasaran Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Sasaran	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%
Menurunnya Kasus stunting di Jawa Barat	2.017.352.490	1.856.483.466	92.03%
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berdaya saing	1.995.667.820.029	1.862.297.463.045	93.32 %
	1.997.685.172.519	1.864.153.946.511	93,32 %

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran untuk sasaran Renstra Dinas Kesehatan rata-rata berada di angka 93.32%. Beberapa faktor yang menyebabkan naiknya realisasi anggaran dari tahun-tahun sebelumnya antara lain kondisi pandemi yang sudah melandai atau berangsur membaik sehingga kegiatan dapat direalisasikan sesuai yang telah direncanakan.

Secara lengkap terkait hasil pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sebagaimana tercantum di dalam tabel 2.2

**Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (Outcomes)/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Kegiatan (Output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Kesehatan									
1	1	Bidang Urusan Kesehatan								
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	93	98.62	91	94.97	104.36	93	95.53	102.72
		Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan kesehatan								
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	93	80	83	84.86	102.24	93	85.95	92.42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		(Outcomes)/			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan (Output)								
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan	100	100	100	100	100.00	100	100.00	100.00
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	100	100	100	100	100.00	100	100.00	100.00
		Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar	100	91.36	96	98.55	102.66	100	96.64	96.64
		Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional	96	90	88	100	113.64	96	95.33	99.31
		Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	100	88.92	90	84.96	94.40	100	91.29	91.29

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		(Outcomes)/			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan (Output)								
		Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat	100	100	100	100	100.00	100	100.00	100.00
		Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	80	29.9	60	45.5	75.83	80	51.80	64.75
		Persentase Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi	100	85.18	90	85	94.44	100	90.06	90.06
		Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas	95	91.77	92	95.34	103.63	95	94.04	98.99

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (Outcomes)/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Kegiatan (Output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)	96	90	95	90.36	95.12	96	92.12	95.96
		Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat	100	91.67	100	100	100.00	100	97.22	97.22
		Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	95	72	90	93.75	104.17	90	85.25	89.74
		Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan	80	50	75	50	66.67	80	60.00	75.00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (Outcomes)/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Kegiatan (Output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Nilai hasil akreditasi RS berdasarkan self assessment								
		Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi	90	100	80.19	100	124.70	90	96.67	107.41
		Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas	93	87.79	90	90.04	100.04	93	90.28	97.07
		Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)	90	85.9	87.75	90.83	103.51	90	88.91	98.79

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		(Outcomes)/			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan (Output)								
		Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif	100	100	100	100	100.00	100	100.00	100.00
		Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) RSUD Al Ihsan	3	3	9	3.06	34.00	3	3.02	100.67
		Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) RSUD Jampangkulon	9		9	3.43	38.11	9	4.14	46.04
		Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) RSUD Pameungpeuk	9	2.48	9	4	44.44	9	5.16	57.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (Outcomes)/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Kegiatan (Output)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) RS Paru Sidawangi	21		21	3.92	18.67	21	8.31	39.56
		Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS) RSKK	9		9	3.13	34.78	9	4.04	44.93
		Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)	21	16.14	21	15.55	74.05	21	17.56	83.63
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	90	90.59	88	90.97	103.375	90	90.52	100.58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		(Outcomes)/			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan (Output)								
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas	100	100	92.6	96.3	104.00	92.6	96.30	96.30
		Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring eksternal TB melalui kegiatan Layad Paru	100	90	80	75	93.75	100	88.33	88.33
		Persentase Unsur Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilibatkan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100	4				0.75		
1	2	3								
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									
1	2	3	1	1						
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	69	86	59	100	169.49	69	85.00	123.19

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		(Outcomes)/			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		Kegiatan (Output)								
		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	70		60		0.00	70	23.33	33.33
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan	100	81	80	100	125.00	100	93.67	93.67
		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	75	21	75	100	133.33	75	65.33	87.11
		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	100	20	85.71	100	116.67	100	73.33	73.33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
		(Outcomes)/			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
		Kegiatan (Output)											
		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	30	30	30	53.85	179.50	30	37.95	126.50			
		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	4.99	4.13	4.57	4.5	98.47	4.99	4.54	90.98			
		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis	80		75	65	86.67	80	48.33	60.42			
1	2	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi										
1	2	1	1	1	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	86,6	86.6	86.6	86.87	100.31	86.6	86.69	100.1
1	2	1	1	2	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	100	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ (<i>Outcomes</i>)/	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Kegiatan (<i>Output</i>)			Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2(2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 1 1 5		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100	100	100	100	100	100	100	



Rata- Rata capaian indikator kinerja program adalah 96,95 % dengan predikat Tinggi. Dari 32 indikator kinerja, 25 indikator telah mencapai/melebihi target dan 7 indikator belum mencapai target yang telah ditentukan. Pencapaian indikator kinerja tersebut, dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi Indikator Kinerja yang belum mencapai target (< 100%) sebanyak 7 indikator kinerja terdiri dari indikator:
 - a. Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
 - b. Persentasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi
 - c. Persentasi Kab/ Kota yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang terakreditasi
 - d. Persentase Penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (UHC)
 - e. Persentase Penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Upaya Peningkatan Kualitas Pelatihan Bidang Kesehatan yang sudah dapat difungsikan
 - f. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis
 - g. Persentase Kab/Kota yang membangun kemitraan dan kerjasama dengan RS Paru untuk jejaring eksternal TB melalui kegiatan Layad Paru

2. Realisasi Indikator Kinerja yang telah mencapai target (= 100%) sebanyak 7 indikator kinerja terdiri dari indikator:
 - a. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
 - b. Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi
 - c. Persentase Kab/Kota yang siap melaksanakan Pelayanan Layad Rawat dalam Upaya meningkatkan akses pelayanan terhadap masyarakat
 - d. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Program Kesehatan di Jawa Barat
 - e. Persentase Kab/Kota yang memanfaatkan Dana BOK dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif
 - f. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis Dinkes
 - g. Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis Upelkes

3. Realisasi Indikator Kinerja yang melebihi target (>100%) sebanyak 18 indikator kinerja terdiri dari indikator:
 - a. Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - b. Presentase Kabupaten/Kota yang penduduknya menggunakan air minum yang berkualitas
 - c. Presentase Kabupaten/Kota yang Penduduknya menggunakan Sanitasi yang layak (Jamban Sehat)
 - d. Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Surveilans Gizi
 - e. Persentase Kab/Kota yang menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
 - f. Persentase Puskesmas di Kab/Kota sesuai standar
 - g. Persentase Kabupaten/kota dengan minimal 50 % puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional
 - h. Persentase Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas
 - i. Lama Rawat pasien dirawat di Rumah Sakit Provinsi (AvLOS)
 - j. Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Pelayanan Laboratorium Kesehatan
 - k. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Terisi Tenaga Kesehatan
 - l. Persentase Pertimbangan Teknis Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dan Sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)



- m. Persentase Kab/Kota yang Menerapkan Kebijakan Germas
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target Indikator kinerja :
 - a. Adanya kebijakan pusat terkait penundaan pelaksanaan akreditasi pada FKTP, FKTL, dan Rumah Sakit, serta regulasi terkait sasaran jaminan kesehatan dengan adanya penurunan jumlah kepesertaan PBI.
 - b. Adanya koordinasi yang komprehensif kaitan monitoring dan evaluasi serta capaian kinerja dengan kabupaten kota serta pengelolaan data yang terintegrasi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat termonitoring dengan baik.
 5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab di atas antara lain:
 - a. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran bersumber dana lain seperti APBN, DBHCHT, CSR, dan lainnya untuk mendukung kegiatan yang belum terbiayai APBD.
 6. Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Perangkat Daerah: Memperhatikan data di atas maka implikasi yang timbul terhadap capaian program Renstra Dinas Kesehatan adalah antara lain adalah :
 - a. Meningkatnya Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di kabupaten/kota. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya persentase masyarakat yang melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan, pelaksanaan SPM di kabupaten/kota pun terus mengalami kenaikan, peningkatan persentase penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan menuju UHC, penurunan rasio kematian bayi. Namun demikian, yang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan adalah bagaimana meningkatkan status akreditasi fasilitas Kesehatan di Jawa Barat karena kualitas pelayanan harus tetap dipertahankan baik bahkan harus lebih baik lagi.
 - b. Meningkatnya ketersediaan farmasi, alat Kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ketersediaan obat esensial di puskesmas, jumlah sarana dan prasarana seperti alat Kesehatan, alat kedokteran yang semakin meningkat di faskes baik kab/kota maupun rumah sakit provinisi.
 - c. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pada bidang kesehatan

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/ Kota	V	V	N/A	67,63	68,92	73,65	66,36	74,66	85,34	87	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT		V	N/A	81,26-81,75	81,76-82,25	89	N/A	81,99	88,65	89	





NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
3	Jumlah RS Provinsi yang terakreditasi paripurna		V	N/A	3	3	4	N/A	3	6	6	
4	Prevalensi Stunting		V	25,2%	23,20%	21,20%	19,20%	26,21%	24,50%	20,20%	19,2%	

a. Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/ Kota

Dalam pelaksanaan SPM di kabupaten/kota, Dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Dasar pasal 22 dikatakan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah kabupaten/kota sehingga melalui Dinas Kesehatan dengan indikator ini bersama-sama kabupaten/kota mengawal dalam penerapannya. Berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2022, rata-rata ketercapaian pelaksanaan SPM di Kabupaten/Kota adalah sebesar 85,34% dengan capaian tertinggi adalah Kota Cimahi yaitu sebesar 100%. Sedangkan untuk capaian terendah adalah Kabupaten Bekasi dengan nilai sebesar 70,64%. Persentase pelayanan SPM di Kabupaten/Kota Tahun 2022 untuk Provinsi Jawa Barat sebesar 85,34% melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 68,92%. Berikut data ketercapaian pelaksanaan SPM di kabupaten/kota :

**Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Kota
Provinsi Jawa Barat**

NO.	KABUPATEN/KOTA	RATA-RATA KAB/KOTA
1	BOGOR	99,77
2	SUKABUMI	85,68
3	CIANJUR	71,72
4	BANDUNG	85,78
5	GARUT	95,12
6	TASIKMALAYA	86,53
7	CIAMIS	82,37
8	KUNINGAN	88,79
9	CIREBON	87,77
10	MAJALENGKA	93,93
11	SUMEDANG	91,55
12	INDRAMAYU	87,61
13	SUBANG	80,80
14	PURWAKARTA	83,43
15	KARAWANG	73,47
16	BEKASI	70,64
17	BANDUNG BARAT	75,25
18	PANGANDARAN	95,43
19	KOTA BOGOR	92,60
20	KOTA SUKABUMI	88,69
21	KOTA BANDUNG	76,42
22	KOTA CIREBON	85,74
23	KOTA BEKASI	80,29
24	KOTA DEPOK	68,24
25	KOTA CIMAH	100,00
26	KOTA TASIKMALAYA	90,16
27	KOTA BANJAR	86,39
	JAWA BARAT	85,34





Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan indikator Persentase Pelayanan SPM di Kabupaten/Kota adalah :

1. Pelaporan dari kabupaten/kota yang tidak tepat waktu.
2. Proses pengumpulan data terkendala oleh aplikasi yang digunakan oleh Kabupaten/Kota.
3. Data yang tidak konsisten antar 2 aplikasi kementerian yaitu kementerian Kesehatan dan kementerian Dalam Negeri.
4. Koordinasi antara pemegang program dan pengolah data program yang belum terlaksana dengan baik.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah :

1. Pertemuan dengan mengundang narasumber pemilik aplikasi SPM
2. Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan Data di Kabupaten/Kota
3. Pendampingan dan pembinaan yang terus menerus

b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 adalah 88,65 dengan kategori baik. Nilai IKM mengalami peningkatan sebesar 6,66 dari tahun 2021 dimana nilai IKM yang dicapai pada tahun 2021 adalah 81,99. Capaian nilai IKM tertinggi pada UPTD RSUD Alihsan dengan nilai 97,08 sedangkan capaian terendah dengan nilai RSUD 83,21 adalah RSUD Pameungpek.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dua kali dalam satu tahun. Kendala teknis yang dihadapi adalah proses pelaksanaan yang lebih dari jadwal yang ditentukan karena kondisi pandemi sehingga berdampak kepada jumlah pengunjung yang menjadi responden.

Permasalahan mengenai hasil pelayanan yang diukur, dari 9 unsur pelayanan yang perlu mendapat perhatian adalah unsur pemenuhan sarana dan prasarana yang belum sesuai keinginan responden meskipun telah memenuhi standar.

c. Jumlah RS Provinsi yang Terakreditasi Paripurna

Target RS Provinsi yang terakreditasi Paripurna di tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 6 rumah sakit dari target 3 rumah sakit.

d. Prevalensi Stunting

Indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka kejadian, sehingga semakin rendah kejadian (angka yang dicapai) maka penilaian kinerjanya semakin baik. Berdasarkan realisasi pencapaian indikator prevalensi stunting pada tahun 2022 sebesar 20,20%. Hal ini berarti bahwa capaian prevalensi stunting tahun 2022 tercapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 21,20%. Ketercapaian indikator prevalensi stunting sangat dipengaruhi oleh intervensi sensitif yang dilakukan oleh sektor di luar kesehatan sehingga memerlukan penguatan di dalam pelaksanaannya.

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2022, selain adanya perubahan kebijakan nasional berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran, terjadi pula kondisi pasca pandemi covid-19 yang berdampak pada pencapaian target-target pembangunan kesehatan di Jawa Barat sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan pembangunan terkait penanganan COVID-19 sebagaimana penanganan penyakit menular lainnya. Dengan memperhatikan capaian dan analisis hasil evaluasi Renstra serta mempertimbangan isu strategis pada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memetakan 7 (tujuh) permasalahan utama bidang kesehatan berdasarkan pengelompokan komponen dari Sistem Kesehatan Daerah (SKD) yang akan dilakukan penanganannya sampai dengan tahun 2023, yaitu:





1. Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat;
2. Belum optimalnya pembiayaan kesehatan di Provinsi Jawa Barat;
3. Belum terpenuhinya SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan sesuai standar;
4. Belum terpenuhinya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan/minuman;
5. Belum optimalnya pengelolaan manajemen kesehatan, data dan informasi kesehatan serta regulasi kesehatan;
6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
7. Belum optimalnya penelitian dan Pengembangan Kesehatan beserta pemanfaatannya

Dalam pelaksanaan kinerja program/kegiatan tahun 2022, Dinas Kesehatan banyak melakukan koordinasi bersama kabupaten/kota karena sebagian besar program/kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan merupakan bentuk pembinaan dan pendampingan serta fasilitasi kepada kabupaten/kota sehingga diharapkan ketercapaian kinerja kabupaten/kota mendukung ketercapaian target pembangunan provinsi. Begitu pula dengan Pemerintah Pusat, Dinas Kesehatan senantiasa berkoordinasi terutama dalam rangka pelaksanaan kegiatan bersumber APBN baik DAK fisik maupun non fisik serta dana dekonsentrasi.

Keberhasilan capaian indikator kinerja Dinas Kesehatan pada tahun 2022, tentu saja akan berimplikasi terhadap ketercapaian target Implikasi terhadap pencapaian visi dan misi gubernur yaitu dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis misi 2 yaitu meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan karena dengan diterapkannya pelayanan SPM paripurna di fasilitas pelayanan dasar di kabupaten/kota, status Kesehatan masyarakat di wilayah kerjasamanya masing-masing dapat terpantau dengan baik. Hal ini terlihat dari ketercapaian indikator daerah bidang Kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) di mana pada tahun 2022 AHH Provinsi Jawa Barat mencapai angka 73,52 poin jauh melebihi target sebesar 73,09 poin.

Dinas Kesehatan telah melakukan pengumpulan data yang akurat dan terkini, melakukan analisis yang tepat serta merumuskan kebijakan-kebijakan di luar biasanya sehingga dapat melahirkan inovasi-inovasi kebijakan program yang tepat dan yang terpenting lagi seluruh lintas sektor turut berperan aktif di dalam penanganan masalah Kesehatan. Dan ini menjadi peluang bagi Dinas Kesehatan untuk melakukan Kerjasama dalam mengatasi permasalahan Kesehatan lainnya yang memerlukan dukungan lintas sektor.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tahap awal proses penyusunan rencana kerja, Dinas Kesehatan melakukan review terhadap rancangan awal RKPD 2024 karena harus memastikan bahwa RKPD memfasilitasi kebutuhan Dinas Kesehatan di tahun 2024. Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Kesehatan, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disandingkan dengan rancangan awal RKPD Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut:





Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Jawa Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin	819,496,142,453	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin	804,758,431,453	
1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada Dinas Kesehatan Daerah	100 Persen	2,587,632,119	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada Dinas Kesehatan Daerah	100 Persen	2,587,632,119	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	427,636,465	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,890,853,739	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,890,853,739	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	427,636,465	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	208,259,150	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	60,882,765	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	60,882,765	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	208,259,150	
1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100 Pesen	779,196,584,977	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	100 Pesen	779,196,584,977	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/ Bulan	777,949,584,977	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	645,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	645,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/ Bulan	777,949,584,977	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	344,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	258,000,000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	258,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	344,000,000	
1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Dinas Terpenuhi	100 Persen	2,998,079,840	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Dinas Terpenuhi	100 Persen	2,798,079,840	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	700,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	300 Orang	500,000,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	1,948,639,840	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26 Dokumen	1,948,639,840	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	349,440,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang	349,440,000	
1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	100 Persen	11,335,575,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	100 Persen	6,997,864,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	4,865,575,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	4,440,425,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	5,820,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,907,439,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	650,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	650,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	80 Persen	10,200,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	100 Persen	7,368,270,517	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10,200,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	3,805,028,000	
1.0 7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	100 Persen	7,368,270,517	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2,662,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	901,242,517	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	901,242,517	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	3,805,028,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100 Persen	5,810,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	2,662,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	327 Unit	2,450,000,000	
1.0 8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100 Persen	5,810,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100 Persen	5,810,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2,600,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	327 Unit	2,450,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	112 Unit	760,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	2,600,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	327 Unit	2,450,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	112 Unit	760,000,000	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Kab/kota dengan IKS >60%	1,97 %	490,804,402,506	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Kab/kota dengan IKS >60%	1,97 %	406,153,623,511	
			Persentase Kab/kota yang Melaksanakan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan	18 %				Persentase Kab/kota yang Melaksanakan Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan	18 %		
			Persentase Kab/kota yang Menurun Angka Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular	85 %				Persentase Kab/kota yang Menurun Angka Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular	85 %		
			Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	67,24 %				Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar	67,24 %		
1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat		Persentase kabupaten/kota yang terdistribusi Obat dan BMHP	100 Persen	735,760,520	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat		Persentase kabupaten/kota yang terdistribusi Obat dan BMHP	100 Persen	35,388,674,105	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	27 Dokumen	735,760,520	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	27 Dokumen	499,524,105	
						Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	27 Paket	34,889,150,000	
1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Jemaah Haji Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Haji	100 Persen	486,326,669,346	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Jemaah Haji Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Haji	100 Persen	369,448,974,766	
			Persentase Kab/Kota Dengan Tata kelola FKTP Sesuai Standar	74.07 Persen				Persentase Kab/Kota Dengan Tata kelola FKTP Sesuai Standar	74.07 Persen		
			Persentase Kab Kota yang melaksanakan program STBM	37 Persen				Persentase Kab Kota yang melaksanakan program STBM	37 Persen		
			Persentase kab/kota yang melakukan pengelolaan/penerapan indikator keluarga sehat 100 persen	100 Persen				Persentase kab/kota yang melakukan pengelolaan/penerapan indikator keluarga sehat 100 persen	100 Persen		
			Persentase kab/kota yang mencapai UHC	55.56 Persen				Persentase kab/kota yang mencapai UHC	55.56 Persen		
			Persentase kab/kota yang menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	92.6 Persen				Persentase kab/kota yang menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	92.6 Persen		
			Persentase Kabupaten/Kota dengan penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas	97.5 Persen				Persentase Kabupaten/Kota dengan penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas	97.5 Persen		
			Persentase Kabupaten Kota Yang 80% Rumah Sakitnya Yang Telaah Menerapkan Sesuai Standar	52.85 Persen				Persentase Kabupaten Kota Yang 80% Rumah Sakitnya Yang Telaah Menerapkan Sesuai Standar	52.85 Persen		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB	100 Persen				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi KLB	100 Persen		
			Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Akibat Bencana dan /Atau Potensi Bencana	100 Persen				Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Terdampak Krisis Akibat Bencana dan /Atau Potensi Bencana	100 Persen		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	30 Dokumen	686,998,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	622,151,840	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	148.661 Orang	1,293,308,880	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	148.661 Orang	311,764,535	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280 Orang	6,327,529,180	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1280 Orang	82,641,290	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	15 Dokumen	1,604,990,300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	6 Dokumen	1,061,450,900	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	7 Dokumen	1,104,398,600	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	157,340,100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	2 Dokumen	353,760,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	152,796,100	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16 Dokumen	2,572,101,216	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	16 Dokumen	1,878,903,560	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	317,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	307,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6 Dokumen	622,151,840	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	30 Dokumen	111,993,600	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 Dokumen	7,863,736,410	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	25 Dokumen	3,508,447,280	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	7 Dokumen	843,817,200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	7 Dokumen	140,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6 Dokumen	315,995,440	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	6 Dokumen	136,904,920	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	459,742,925,800	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	358,554,991,421	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	272,020,120	Pengelolaan Surveilans Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	513,814,300	
	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	1,263,259,180	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	288,158,240	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	71 Dokumen				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	71 Dokumen		
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23 Unit	1,142,677,180	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	23 Unit	1,620,616,680	
1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	100 Persen	478,629,880	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	100 Persen	478,629,880	
			Persentase Layanan Yang Memanfaatkan Sistem Informasi	100 Persen				Persentase Layanan Yang Memanfaatkan Sistem Informasi	100 Persen		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				478,629,880	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informaasi Kesehatan	1 Dokumen	478,629,880	
								Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		
								Jumlah Profil Kesehatan	1 Dokumen		
1.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas		Persentase fasyankes terakreditasi	100 Persen	3,263,342,760	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas		Persentase fasyankes terakreditasi	100 Persen	837,344,760	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi					
			Persentase Kabupaten Kota Dengan Fasyankes Yang Melakukan Tata Kelola Sesuai Standar	100 Persen				Persentase Kabupaten Kota Dengan Fasyankes Yang Melakukan Tata Kelola Sesuai Standar	100 Persen		
			Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Sesuai Dengan Standar	95 Persen				Persentase Kualitas Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Sesuai Dengan Standar	95 Persen		
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	90 Unit	413,405,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2954 Unit	388,439,960	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2954 Unit	846,294,960	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	90 Unit	106,534,000	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	27 Unit	2,003,642,800	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	27 Unit	342,370,800	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Kabupaten/ Kota Memenuhi Standar Ketenagaan Minimal di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah	55 %	163,764,703,168	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Kabupaten/ Kota Memenuhi Standar Ketenagaan Minimal di Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah	55 %	31,689,916,694	
1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Kabupaten Kota Yang Memiliki Dokumen Kebutuhan dan Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan	74.07 Persen	162,496,477,568	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Kabupaten Kota Yang Memiliki Dokumen Kebutuhan dan Memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Kebutuhan	74.07 Persen	31,443,862,100	
	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	2505 Orang	162,496,477,568	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	2505 Orang	31,443,862,100	
1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kabupaten/Kota Minimal 80% Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Teregistrasi Yang Aktif Bekerja Difasilitas Pelayanan Kesehatan Teregistrasi	67 Persen	1,268,225,600	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kabupaten/Kota Minimal 80% Yang Memiliki Tenaga Kesehatan Teregistrasi Yang Aktif Bekerja Difasilitas Pelayanan Kesehatan Teregistrasi	67 Persen	246,054,594	
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	1,268,225,600	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5 Dokumen	246,054,594	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Sesuai Standar Perizinan	92 %	503,777,300	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Sesuai Standar Perizinan	92 %	169,112,900	
1.0 1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Persentase sarana PBF Cabang, cabang DAK, PBK dan PBOT yang diawasi dan dikendalikan dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut perizinan	70 Persen	381,316,400	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)		Persentase sarana PBF Cabang, cabang DAK, PBK dan PBOT yang diawasi dan dikendalikan dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut perizinan	70 Persen	156,030,800	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	90 Sarana	381,316,400	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK		Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	90 Sarana	156,030,800	
1.0 2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				122,460,900	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				13,082,100	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	35 Sarana	122,460,900	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional		Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	35 Sarana	13,082,100	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kerjasama/kemitraan Tingkat Daerah Provinsi (Evaluasi Pelaksanaan dan Implementasi PKS-nya)	5 %	3,498,736,285	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kerjasama/kemitraan Tingkat Daerah Provinsi (Evaluasi Pelaksanaan dan Implementasi PKS-nya)	5 %	2,060,700,271	
1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas	92.59 Persen	1,336,742,405	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas	92.59 Persen	833,002,405	
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	6 Dokumen	1,336,742,405	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	6 Dokumen	833,002,405	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi					
1.0 2	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	92.59 Persen	2,161,993,880	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	92.59 Persen	1,227,697,866	
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8 Dokumen	2,161,993,880	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8 Dokumen	1,227,697,866	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	92,5 Poin	28,824,634,814	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	92,5 Poin	9,490,220,109	
1.0 1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi kepegawaian	100 Persen	571,711,000						
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	571,711,000						
1.0 2	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dan keuangan	100 Persen	5,095,696,120	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dan keuangan	100 Persen	3,178,621,843	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	413,400,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	305,300,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	67,096,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	63,514,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	557,215,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	295,805,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	210,042,400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	210,042,400	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	386,170,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	386,170,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3,461,772,520	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,917,790,443	
1.0 3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah penunjang UPTD Labkes	100 Persen	401,430,000						



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	401,430,000						
1.04	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang UPTD Labkes	100 Persen	6,299,507,694	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya kualitas pelayanan jasa penunjang UPTD Labkes	100 Persen	5,998,258,266	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,132,377,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1,928,327,772	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,167,130,494	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4,069,930,494	
1.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	412,990,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya barang milik daerah	100 Persen	313,340,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	412,990,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	313,340,000	
1.06	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase terpenuhinya pelayanan BLUD	100 Persen	16,043,300,000						
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	16,043,300,000						
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan UPTD Labkes	92,5 Poin	18,542,529,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan UPTD Labkes	92,5 Poin	19,087,910,000	
1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Alat Laboratorium dan Non Laboratorium yang terkalibrasi	2400 Alat	18,489,959,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Alat Laboratorium dan Non Laboratorium yang terkalibrasi	2400 Alat	19,035,340,000	
			Jumlah Dokumen K3	1 Dokumen				Jumlah Dokumen K3	1 Dokumen		
			Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler	14000 Pemeriksaan				Jumlah Hasil Pemeriksaan Laboratorium Biomolekuler	14000 Pemeriksaan		
			Jumlah kegiatan penyelenggaraan Uji Profisiensi	2 Kegiatan				Jumlah kegiatan penyelenggaraan Uji Profisiensi	2 Kegiatan		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
			Jumlah Laporan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Kesehatan Lingkungan	1700 Laporan				Jumlah Laporan Pemeriksaan Laboratorium Kimia Kesehatan Lingkungan	1700 Laporan		
			Jumlah Laporan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi	9100 Pemeriksaan				Jumlah Laporan Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi	9100 Pemeriksaan		
			Jumlah pemeriksaan kesehatan dan penunjang	21578 Orang				Jumlah pemeriksaan kesehatan dan penunjang	21578 Orang		
			Jumlah pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik	29755 Pemeriksaan				Jumlah pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik	29755 Pemeriksaan		
			Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dilakukan	100 persen				Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dilakukan	100 persen		
			Jumlah sarana prasarana pelayanan yang disediakan	60 persen				Jumlah sarana prasarana pelayanan yang disediakan	60 persen		
			Persentase sample pemeriksanaan rujukan yang dilayani	85 persen				Persentase sample pemeriksanaan rujukan yang dilayani	85 persen		
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	8,000,046,000						
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	2,528,450,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	1 Unit	938,140,000	
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	7,463,091,000	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	97,200,000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi		Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Disediakan dan Dipelihara	30 Unit	498,372,000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	5 Paket	18,000,000,000	
1.0 2	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen akreditasi	1 Dokumen	52,570,000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah dokumen akreditasi	1 Dokumen	52,570,000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	52,570,000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	52,570,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				3,315,996,028	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	97.1 Poin	6,176,165,777	
1.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				201,495,800	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin		
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	201,495,800	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Persentase Administrasi Kepegawaian Dinas Terpenuhi	100 Persen	201,495,800	
1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah				799,587,504	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	201,495,800	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	102,562,224	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	100 Persen	799,587,504	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	151,296,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	102,562,224	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63,122,370	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	151,296,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	219,255,525	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63,122,370	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	263,351,385	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	219,255,525	
1.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,351,234,830	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	263,351,385	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,351,234,830	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	80 Persen	1,502,484,900	
1.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103,890,894	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,502,484,900	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	103,890,894	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	100 Persen	2,802,043,073	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,155,008,533	
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	647,034,540	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.05	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				859,787,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100 Persen	870,554,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	321,305,100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	321,305,100	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300,750,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	311,517,500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	237,731,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	237,731,900	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				417,361,800	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan UPELKES	88,5 Poin	417,361,800	
1.01	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				417,361,800	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pelatihan Bidang Kesehatan Yang Terakreditasi Sesuai Standar Dalam Satu Tahun	100 Persen	417,361,800	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	417,361,800	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	417,361,800	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				1,280,440,420	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	100 %	841,978,480	
1.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				1,280,440,420	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan	100 Persen	841,978,480	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	610 Orang	1,280,440,420	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	265 Orang	841,978,480	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin	48,166,874,646	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin	44,566,174,646	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.0 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum di RSUD Pameungpeuk	100 Persen	2,900,700,000						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,900,700,000						
1.0 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	80 Persen	1,700,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	80 Persen	1,000,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1,700,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1,000,000,000	
1.0 3	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	43,566,174,646	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	43,566,174,646	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	43,566,174,646	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	43,566,174,646	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	86,95 Poin	193,677,524,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	86,95 Poin	6,000,000,000	
1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	186,049,534,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	5,000,000,000	
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	143,861,600,000						
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				36,887,934,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	51 Unit	5,000,000,000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	5,300,000,000						



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	7,627,990,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	1,000,000,000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	7,000,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	627,990,000						
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis RS Pameungpeuk	75 Persen	22,000,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis RS Pameungpeuk	75 Persen	13,000,000,000	
1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Medik Sesuai Standar	100 Persen	22,000,000,000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Medik Sesuai Standar	100 Persen	13,000,000,000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	268 Orang	22,000,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	268 Orang	13,000,000,000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin	48,166,874,646	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin	44,566,174,646	
1.0 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum di RSUD Pameungpeuk	100 Persen	2,900,700,000						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2,900,700,000						
1.0 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	80 Persen	1,700,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	80 Persen	1,000,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1,700,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1,000,000,000	
1.0 3	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	43,566,174,646	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	43,566,174,646	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	43,566,174,646	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	43,566,174,646	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	86,95 Poin	193,677,524,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	86,95 Poin	6,000,000,000	
1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	186,049,534,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	5,000,000,000	
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	143,861,600,000						
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				36,887,934,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	51 Unit	5,000,000,000	
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Paket	5,300,000,000						
1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	7,627,990,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	1,000,000,000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	7,000,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1,000,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3 Dokumen	627,990,000						
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis RS Pameungpeuk	75 Persen	22,000,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase SDM Kesehatan yang mendapat Pelatihan Strategis RS Pameungpeuk	75 Persen	13,000,000,000	
1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Medik Sesuai Standar	100 Persen	22,000,000,000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Medik Sesuai Standar	100 Persen	13,000,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	268 Orang	22,000,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	268 Orang	13,000,000,000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin	81,903,866,387	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin	65,808,966,387	
1.0 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	100 Persen	1,500,000,000						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	618 Laporan	1,500,000,000						
1.0 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	80 Persen	2,000,000,000						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	2,000,000,000						
1.0 3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	100 Persen	12,595,000,000						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9,075,000,000						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3,520,000,000						
1.0 4	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	65,808,866,387	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	65,808,966,387	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	65,808,866,387	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	65,808,966,387	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	82,75 Poin	291,048,780,515	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	82,75 Poin	6,499,900,000	
1.0 1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	282,048,780,515	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	5,000,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				73,177,780,515	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	5,000,000,000	
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	549 Unit	600,000,000						
	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	5 Unit	200,271,000,000						
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	45 Paket	8,000,000,000						
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	47 Paket							
1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	6,500,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	499,900,000	
			Persentase pembiayaan kesehatan di tingkat provinsi sesuai kebutuhan	100 Persen				Persentase pembiayaan kesehatan di tingkat provinsi sesuai kebutuhan	100 Persen		
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1500 Dokumen	6,500,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	350 Dokumen	499,900,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	100 Persen	2,500,000,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	100 Persen	1,000,000,000	
			Persentase Layanan Yang Memanfaatkan Sistem Informasi	100 Persen				Persentase Layanan Yang Memanfaatkan Sistem Informasi	100 Persen		
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2,500,000,000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah alat dukung Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	85 Unit	1,000,000,000	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	100 %	18,742,500,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	100 %	15,000,000,000	
1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Medik Sesuai Standar	100 Persen	18,242,500,000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Medik Sesuai Standar	100 Persen	15,000,000,000	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	32 Orang	18,242,500,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	32 Orang	15,000,000,000	
1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan	100 Persen	500,000,000						
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	100 Orang	500,000,000						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RS Jiwa	87 Poin	51,419,822,053	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RS Jiwa	87 Poin	51,419,822,053	
1.0 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Tata Usaha < 24 Jam	100 persen	650,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pengelolaan Tata Usaha < 24 Jam	100 persen	650,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	150,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	150,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500,000,000	
1.0 2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan	100 persen	12,350,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase unit kerja yang terlayani jasa keamanan dan kebersihan	100 persen	12,350,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,350,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12,350,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
1.03	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 persen	38,419,822,053	Peningkatan Pelayanan BLUD		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100 persen	38,419,822,053	
			Persentase ketersediaan obat psikiatri	100 persen				Persentase ketersediaan obat psikiatri	100 persen		
			Persentase pasien terlayani pelayanan Gizi	100 persen				Persentase pasien terlayani pelayanan Gizi	100 persen		
			Persentase pasien terlayani pelayanan Laundry	100 persen				Persentase pasien terlayani pelayanan Laundry	100 persen		
			Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen				Persentase unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 persen		
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	38,419,822,053	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	38,419,822,053	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS Jiwa	87 Poin	22,251,038,720	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS Jiwa	87 Poin	1,500,000,000	
1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah unit yang terpenuhi layanan sarana dan prasarana medik	4 unit	17,251,038,720	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah unit yang terpenuhi layanan sarana dan prasarana medik	4 unit	500,000,000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	500,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	12 Unit	500,000,000	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	16,751,038,720						
1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan	100 persen	5,000,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan	100 persen	1,000,000,000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	5,000,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1,000,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS Jiwa	87 poin	3,141,357,760	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan RS Jiwa	87 poin	3,141,357,760	
1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah rencana Kebutuhan Pegawai yang tersusun	1 dokumen	3,141,357,760	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Jumlah rencana Kebutuhan Pegawai yang tersusun	1 dokumen	3,141,357,760	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	3,141,357,760	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12 Orang	3,141,357,760	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				34,808,095,597	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	97.1 Poin	22,851,059,026	
								Nilai SAKIP Perangkat Daerah	87,2 Poin		
1.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				300,000,000						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50,000,000						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	250,000,000						
1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,220,000						
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	100,220,000						
1.0 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2,000,000,000						
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	89 Orang	2,000,000,000						
1.0 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3,700,672,100						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1,500,602,000						



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1,200,000,000						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1,000,070,100						
1.05	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,025,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	100 Persen	7,025,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,025,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2,025,000,000	
1.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7,467,407,700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	100 Persen	1,611,263,229	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	5,000,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	743,855,529	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1,600,000,000						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	867,407,700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	867,407,700	
1.07	Peningkatan Pelayanan BLUD				14,214,795,797	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	14,214,795,797	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	14,214,795,797	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	14,214,795,797	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				188,040,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	85 Poin	30,500,000,000	
1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat				186,290,000,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	30,000,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi					
	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	140,000,000,000						
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan				44,690,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	0 Unit	30,000,000,000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	446 Unit	1,600,000,000						
1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				1,600,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	500,000,000	
	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	12 Dokumen	100,000,000						
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1,000,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	500,000,000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	500,000,000						
1.0 3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				150,000,000						



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	0 Unit	150,000,000						
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				20,200,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah yang Terisi Tenaga Kesehatan UOBK RS Paru Provinsi Jawa Barat	100 persen	7,000,000,000	
1.0 1	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi				17,000,000,000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Medik Sesuai Standar	100 Persen	7,000,000,000	
								Tersedianya Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	100 Persen		
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	90 Orang	17,000,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	90 Orang	7,000,000,000	
1.0 2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi				3,200,000,000						
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	3,200,000,000						
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				200,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	97.1 Poin	407,817,467,500	
1.0 1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi				200,000,000						
	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan		Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	12 Dokumen	200,000,000						



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi										
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	97.1 Poin	477,846,127,619						
1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada Dinas Kesehatan Daerah	100 Persen	274,400,000						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	274,400,000						
1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	100 Persen	13,706,986,780						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	13,353,526,780						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	353,460,000						
1.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	80 Persen	3,000,000,000						
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	3,000,000,000						
1.0	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	460,864,740,839	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	100 Persen	407,817,467,500	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	460,864,740,839	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	407,817,467,500	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indikator Nasional Mutu di RSUD Al Ihsan	69 Persen	42,400,000,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indikator Nasional Mutu di RSUD Al Ihsan	69 Persen	7,000,000,000	
1.0	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	10,000,000,000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Tersedianya Fasilitas Pelayanan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar	82 Persen	5,000,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	
	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	10,000,000,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Paket	5,000,000,000	
1.0 2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	32,400,000,000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayan Medik dan Keperawatan Sesuai Standar	100 Persen	2,000,000,000	
			Persentase pembiayaan kesehatan di tingkat provinsi sesuai kebutuhan	100 Persen				Persentase pembiayaan kesehatan di tingkat provinsi sesuai kebutuhan	100 Persen		
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	32,400,000,000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	2,000,000,000	



Secara umum, antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan kebutuhan Renja Dinas Kesehatan tidak terdapat perbedaan dari program dan kegiatan, hanya berbeda dari besaran anggaran yang dibutuhkan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Dinas Kesehatan selaku Perangkat daerah yang memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat menerima berbagai usulan dari masyarakat dalam bentuk pembangunan rumah sakit, pembangunan puskesmas, pembiayaan Kesehatan, pengadaan alat Kesehatan, penguatan kapasitas sumberdaya manusia, dan lain sebagainya. Melalui forum perangkat daerah, Dinas Kesehatan memfasilitasi kabupaten/kota untuk menyampaikan kebutuhannya untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh bidang pengampu yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Hasil kesepakatan telah dikoordinasikan bersama Bappeda kabupaten/kota masing-masing dan diinput ke dalam SIPD. Sebagian besar usulan yang masuk melalui aplikasi SIPD, sudah memenuhi persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, namun masih banyak pula usulan yang lampiran persyaratannya tidak lengkap bahkan tidak mendukung terhadap usulan yang diajukan. Berikut usulan yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang sudah diinput di dalam aplikasi SIPD:





Tabel 2.5.1 Usulan Program dan Kegiatan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Volume Kegiatan	Pagu (Rp)	Ket.
1	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kota Banjar	40.000 Jiwa	7,257,600,000	
2	Pengadaan Alat Kesehatan	RSUD Asih Husada	1 Paket	10,321,965,950	
3	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Rawat Inap dan Ruang Operasi pada BLUD RSU Kota Banjar	BLUD RSU	1 Paket	32,454,334,058	
4	Pengadaan MOT Ruang Instalasi Bedah Sentral pada BLUD RSU Kota Banjar	BLUD RSU	1 Paket	45.776.256.000	
5	Pembangunan Lanjutan Gedung Instalasi Radiologi LT II Pada BLUD RSU Kota Banjar	BLUD RSU	1 Paket	2.163.048.000	
6	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	Kota Banjar	1 Paket	1,321,000,000	
7	Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	123.247 Orang	22.361.935.680	
8	Pembangunan Lanjutan RS Dewisartika	RS Dewi Sartika	1 Unit	25.000.000.000	
9	Pengadaan Alat Kesehatan RS Dewisartika	RS Dewi Sartika	1 Paket	38.000.000.000	
10	Pengembangan Ruang Operasi Rumah Sakit (Penataan Arsitektur Ruangan OK Lantai 5 dan Pembuatan Ruang MOT)	Kota Tasikmalaya	2 Paket	37.015.771.500	
11	Pengadaan Alat Kesehatan	22 Puskesmas	1 Paket	9.115.000.000	
12	Pembiayaan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota PBI	Kota Cimahi	1 paket	15.059.520.000	
13	Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi	Kota Cimahi	4 paket	126.469.500.000	
14	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kota Depok	329.083 jiwa	59.708.819.520	
15	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD KiSA)	Kota Depok	1 paket	33.571.740.000	
16	Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (RSUD ASA)	Kota Depok	1 paket	10.473.995.000	
17	Revitalisasi Posyandu TA 2024	Kota Depok	1 Pokjanal Posyandu Kota; 11 Pokjanal Posyandu Kecamatan; 63 Pokja Posyandu Kelurahan; 1.049 Posyandu	1.927.350.000	
18	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	372.963 Jiwa	67.670.406.720,00	
19	Pembangunan Ruang Rawat Inap dan Ruang Poli Rawat Jalan RSUD Kelas D Jatisampurna (5 Lantai)	Kel. Jatisampurna Kec. Jatisampurna	5 lantai	32.814.244.000,00	
20	Pembangunan Ruang Rehab Medik, Ruang Penunjang Pelayanan Kesehatan, Instalasi Hydran, Pengembangan Jaringan PABX, Instalasi Vakum Gas Medis dan Kompresor	Kel. Jatiwaringin Kec. Pondokgede	1 paket	4.255.000.000,00	
21	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bekasi Jaya	Kecamatan Bekasi Timur	2 Paket	5.000.000.000,00	
22	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jalan Komodo Raya Perumnas I Bekasi Kel. Kayuringin Jaya Kec. Bekasi Selatan	Alat Kalibrasi (5 Unit : Micropipet, Tensimeter, Infan Warmer/ Inkubator Bayi, Timbangan/ Tera, Dopler/CTG)	1.855.309.744,00	
23	Sosialisasi Pelaksanaan Surveilens Migrasi kepada Petugas Malaria dan Lintas Sektor	Kota Cirebon	1 kegiatan	40.318.000	
24	Penatalaksanaan TB Pelatihan DOTS TB/TB RO	Dinas Kesehatan	1 Paket	176.000.000	
25	Pelatihan Notifikasi Pasangan	Dinas Kesehatan	1 Paket	176.000.000	



No	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Volume Kegiatan	Pagu (Rp)	Ket.
26	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2024	Dinas Kesehatan	107.248 Jiwa	19.458.986.400	
27	SI PENTING GIZI BAE (Siaga Penanggulangan Stunting Gizi Mbok Lan Anake)	22 Kelurahan Di Kota Cirebon	600 Orang	1.711.800.000	
28	Jaminan Kesehatan Bagi PBPU dan BP	Kota Bandung	634.435 Jiwa	115.111.886.400	
29	Rembulan Beranting (Remaja Bandung Unggul Tanpa Anemia Bersama Atasi Stunting)	Kota Bandung	1 Paket	10.733.790.000	
30	Pembangunan Gedung RSKGM Kota Bandung	Kota Bandung	1 Unit	229.520.499.000	
31	Pembangunan Gedung Puskesmas	Kota Bandung	4 Unit	18.712.345.000	
32	Pengembangan RSUD Kota Bandung	Kota Bandung	1 Paket	67.994.241.000	
33	Pengembangan RSUD Bandung Kiwari (Pengembangan Ruang Rawat Inap untuk Pasien Jantung)	Kota Bandung	1 Paket	4.214.324.600	
34	Pengembangan Laboratorium Kesehatan	Kota Bandung	1 Paket	2.539.813.000	
35	Pembangunan RSUD Kota Bandung	Kota Bandung	1 Paket	155.238.048.000	
36	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta Pekerja Bukan Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kota Sukabumi	Kota Sukabumi (Dinas Kesehatan)	45.615 Jiwa	8.276.385.600	
37	Siponi keling (sistem informasi terintegrasi data stunting dan posyandu disukabumi serta curhat keliling	Kota Sukabumi	1 Paket	3.000.000.000	
38	Penanggulangan Aids - TBC - Malaria	Kota Sukabumi (Dinas Kesehatan)	15 Puskesmas	850.055.500	
39	Pengadaan Alat Kesehatan	Kota Sukabumi (RSUD R Syamsudin SH)	3 Paket	15.000.563.122	
40	Revitalisasi Gedung Blok I Lanjutan	RSUD Kota Bogor, Jl. DR. Sumeru No.120, RT.03/RW.20, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 1611	1 Unit (2 Lantai)	98.000.000.000	
41	Pengadaan Alat Kesehatan	RSUD Kota Bogor, Jl. DR. Sumeru No.120, RT.03/RW.20, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 1611	120 Unit	15.672.943.235	
42	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Penduduk Miskin dan Tidak Mampu Kota Bogor	186.539 jiwa	33.845.628.600	
43	SELARAS (Konseling Lingkungan dan Rumah Sehat)	68 Kelurahan	1 Kegiatan	2.219.930.000	
44	STOP Pita Merah (Suluh Temukan Obati Pertahankan Kolaborasi Kita Masyarakat Peduli HIV)	68 Kelurahan	1 Kegiatan	5.961.100.000	
45	Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Integrasi Kedalam Jaminan Kesehatan Nasional	KBB	145.400 jiwa	26.380.000.780	
46	Sarana Prasarana dan Alat kesehatan RSUD Cikalongwetan	RSUD Cikalongwetan	1 paket	26.759.463.106	
47	Peralatan Kesehatan, Pengembang Gedung Ruang Kebidanan Terpadu dan Instalasi Gawat Darurat	RSUD Lembang	1 paket	78.621.016.570	
48	Pengadaan Alat Kesehatan dan Pemeliharaan Gedung Labkesda	Labkesda Kabupaten Bandung Barat	1 paket	3.317.891.444	
49	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kab. Pangandaran	32.800 Orang	14.878.080.000	
50	Saresehan (Sahabat Remaja Sehat Pangandaran)	15 SMP/SMA/SMK dan 15 Posyandu Remaja di wilayah Kabupaten Pangandaran	1 Paket	1.249.150.000	
51	MATA HATI (Mari Kita Sehatkan Balita)	13 Desa Lokus Stunting Tahun 2023, Desa Kersaratu, Cikembulan, Kertayasa, Margacinta, Cibanten, Ciganjeng, Karangsari, Putrapinggan, Emplak, Selasari, Sukajaya, Mekarsari, Jangraga	1 Paket	1.000.690.000	



No	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Volume Kegiatan	Pagu (Rp)	Ket.
52	Peningkatan Puskesmas Jadikarya	Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran	1 Puskesmas	6.000.000.000	
53	Peningkatan Puskesmas Selasari	Desa Selaras Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran	1 Puskesmas	6.000.000.000	
54	Peningkatan Puskesmas Sidamulih	Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran	1 Puskesmas	6.000.000.000	
55	Pembangunan Gedung E Rawat Inap RSUD Pandega Pangandaran (Lanjutan)	Kabupaten Pangandaran	1 Unit	60.000.000.000	
56	Pengadaan Alat Kesehatan Ruang Poliklinik Rawat Jalan RSUD Pandega Pangandaran	Kabupaten Pangandaran	1580 Unit	15.183.692.602	
57	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Radiologi RSUD Pandega Pangandaran	Kabupaten Pangandaran	3 Unit	22.731.128.726	
58	Pengembangan Rumah Sakit untuk Pembangunan Gudang Farmasi, Rekam Medis dan Arsip beserta Sarana dan Prasarana	Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran	1 Unit	10.000.000.000	
59	Pembangunan Gudang E Rawat Inap RSU Pandega Pangandaran beserta Sarana dan Prasarana	Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran	1 Unit	50.000.000.000	
60	Pembangunan Gudang Obat dan Arsip RSUD Pandega Pangandaran	Kabupaten Pangandaran	1 Unit	10.000.000.000	
61	Bantuan Keuangan Bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3/ Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Bekasi	757.824 orang	137.499.768.000	
62	Jaminan Kesehatan Bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Karawang	144.211 orang	26.165.643.840	
63	Pengembangan Rumah Sakit (RSUD Karawang)	Kab. Karawang	1 lokasi	23.912.627.000	
64	Pengembangan Rumah Sakit (RSKP Jatisari Karawang)	Jatisari	5 unit	3.094.175.956	
65	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) di Kabupaten Purwakarta)	Kabupaten Purwakarta	95579 Jiwa	17.341.853.760	
66	Pencegahan Stunting Anak dengan Pemberian Makanan Aman (Pancingan Mama)	Kabupaten Purwakarta	1 paket	1.200.000.000	
67	Peningkatan Puskesmas DTP Wanayasa	Kabupaten Purwakarta	1 paket	8.000.000.000	
68	Peningkatan Puskesmas DTP Kiarapedes	Kabupaten Purwakarta	1 paket	6.000.000.000	
69	Peningkatan Puskesmas DTP Pondok Salam	Kabupaten Purwakarta	1 paket	8.000.000.000	
70	Peningkatan Puskesmas DTP Maniis	Kabupaten Purwakarta	1 paket	8.000.000.000	
71	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Kab. Subang	149013 Orang	27.036.918.720	
72	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pantura	Kab. Subang	1 Kegiatan	20.340.000.000	
73	Pembangunan Gedung Rawat Inap Gangguan Jiwa	Kabupaten Subang	1 Paket	4.000.000.000	
74	Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran	Kabupaten Subang	1 Paket	20.000.000.000	
75	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kab. Indramayu	Kab. Indramayu	97.974 jiwa	Rp 44.440.885.440	
76	Pengembangan Rumah Sakit Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu	RSUD Kab. Indramayu	214 unit	Rp 23.000.000.000	
77	Pengembangan Rumah Sakit - Pengadaan Alat Kedokteran/Alat Kesehatan pada RSUD Mursid Ibnu Syafiuddin Kab. Indramayu	RSUD MIS Krangkeng	731 Unit	Rp 33.248.142.769	
78	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit - RSUD Pantura MA Sentot Patrol Kabupaten Indramayu	RSUD MA Sentot	1 Unit	Rp 7.461.460.000	
79	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kabupaten Sumedang	110.578 Orang/Jiwa	20.063.272.320,00	
80	Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Rumah Sakit Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang	178 unit	25.730.401.669,00	
81	Pembangunan Lantai 2 (dua)	Puskesmas Paseh	812 M2	3.126.200.000	
82	Pembangunan Lantai 2 (dua)	Puskesmas Cisarua	440 M2	1.694.000.000	
83	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Majalengka	Usulan bantuan iuran Kepesertaan PBI Pemda 32 Puskesmas (84.000 jiwa)	38.102.400.000	
84	Sipenting Hepi (aksi pencegahan stunting ibu hamil. Remaja putri, bayi, balita tertintegrasi	Kab. Majalengka	3 kali	5.621.000.000	



No	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Volume Kegiatan	Pagu (Rp)	Ket.
85	Pembangunan Gedung Rumah Sakit RS Talaga	Kab. Majalengka	1 Paket Pengembangan fisik bangunan RS Talaga	383.666.933.451	
86	Pengembangan Gedung Rumah Sakit RS Talaga	Kab. Majalengka	1 Paket Penyediaan alat kesehatan RS Talaga	236.627.000.000	
87	Pengembangan Rumah Sakit RS Majalengka	Kab. Majalengka	1 Paket Alat Kesehatan	18.036.508.000	
88	Pembangunan Gedung Manajemen RSUD Cideres	Kab. Majalengka	1 Paket	25.211.757.450	
89	Pengadaan Alat Kesehatan Haemodialisa, Rawat Inap, Bank Darah, Ruang Operasi, ICU, NICU, dan IGD di RSUD Cideres	Kab. Majalengka	73 Unit/Set	14.288.048.128	
90	Pengadaan Penunjang Medik Ruang Operasi: MOT (Modular Operating Theatre)	Kab. Majalengka	8 set	61.756.858.416	
91	Pengembangan Labkes Kabupaten/Kota	Kab. Majalengka	1 Paket Pengadaan Sarana Prasarana Labkes	4.427.176.559	
92	Peningkatan Puskesmas	Kab. Majalengka	Pemeliharaan dan rehab puskesmas 14 Puskesmas	59.500.000.000	
93	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kabupaten Cirebon.	142244 orang	64.521.878.400	
94	Bersama Atasi Stunting dengan Skrining Terintegrasi (BANTING SETIR)	Kabupaten Cirebon	28 Desa	5.875.996.700	
95	Edukasi Praktik Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak	Kabupaten Cirebon	80 Desa di 40 kec	9.117.094.000	
96	Pengembangan Rumah Sakit (Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (RSUD WALED)	Kabupaten Cirebon	1 Paket (Alat kesehatan)	157.858.355.071	
97	Pengembangan Rumah Sakit (Pengadaan Alat Kesehatan) RSUD ARJAWINANGUN	Kabupaten Cirebon	1 Paket (Alat kesehatan)	146.842.360.000	
98	Pembiayaan Untuk Pembayaran Iuran PBI Daerah Kabupaten Di Kabupaten Kuningan	Kabupaten Kuningan	200,181 Orang	36.320.840.640	
99	Perubahan Perilaku Masyarakat Terhadap Ibu Hamil (KEK Dan Anemia) Dan Inisiasi Menyusui Dini	Kabupaten Kuningan	37 Puskesmas	7.400.000.000	
100	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Non Rujukan Regional Perbatasan Kabupaten Kuningan	Kec, Cibeureum Kabupaten Kuningan	1 Paket	30.000.000.000	
101	Peningkatan Ruang Pelayanan Gedung Puskesmas	13 Puskesmas (Ruang Layanan Persalinan) - Puskesmas Sindangagung - Puskesmas Kadugede - Puskesmas Nusaherang - Puskesmas Kuningan - Puskesmas Jalaksana - Puskesmas Hantara - Puskesmas Karangkencana - Puskesmas Cipicung - Puskesmas Kramatmulya - Puskesmas Linggarjati - Puskesmas Cihaur - Puskesmas Lamepayung - Puskesmas Mekarwangi 10 Puskesmas (Ruang ATM) - Puskesmas Kramatmulya - Puskesmas Pancalang - Puskesmas Garawangi	13 Paket Puskesmas (Ruang Layanan Persalinan) 10 Paket Puskesmas (Ruang ATM)	10.750.000.000	



No	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Volume Kegiatan	Pagu (Rp)	Ket.
		- Puskesmas Cilimus - Puskesmas Selajambe - PUSkesmas Cibeureum - Puskesmas Pasawahan - Puskesmas Ciawigebang - Puskesmas Karangkencana - Puskesmas Cipicung			
102	Peningkatan Gizi Anak 0-23 bulan melalui Kegiatan "Pawang Hati Bucin" (Pengawasan dan Perhatian Khusus untuk Bayi, Balita, dan Ibu Menyusui dengan Cinta)	Kab. Ciamis	1 Paket	920.000.000	
103	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah	Kab. Tasikmalaya	178.726 orang	32.428.045.440	
104	TARING SMART STUNTING (Penguatan Jejaring Rujukan, Sarjana Damping, Picu Sanitasi, Asupan Gizi, Kejar USG, Germas TB, dan Smart Stunting)	Kabupaten Tasikmalaya	67 Desa Lokus Stunting	24.777.911.018	
105	Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya	Kecamatan Cikatomas	1 Paket	15.000.000.000	
106	Pengadaan Alat Kesehatan dan Mebelair Rumah Sakit Umum Daerah Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya	Kecamatan Cikatomas	1 Paket	27.174.953.220	
107	Peningkatan Puskesmas Cibalong, Parungponteng, Karangjaya, Jamanis dalam Rangka Peningkatan Kesehatan Ibu & Anak	Kecamatan Cibalong, Parungponteng, Karangjaya, Jamanis	4 Paket	8.978.816.000	
108	Peningkatan Puskesmas Manonjaya, Salawu, Karangnunggal, Taraju dalam Rangka Penanggulangan ATM (Aids, Tuberculosis, Malaria)	Kecamatan Manonjaya, Salawu, Karangnunggal, Taraju	4 Paket	4.294.573.000	
109	Pengadaan Alat Kesehatan Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSUD SMC Kabupaten Tasikmalaya	Kabupaten Tasikmalaya	1 Paket	35.576.328.856	
110	Pembangunan Gedung Cancer Center dan Pengadaan Alat Kesehatan	Kabupaten Tasikmalaya (RSUD SMC)	1 Paket	6.500.586.739	
111	Pengadaan Alat Kesehatan di RSUD SMC	Kabupaten Tasikmalaya (RSUD SMC)	1 Paket	3.370.811.353	
112	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kabupaten Garut	212.743 Jiwa	38.600.089.920	
113	Peningkatan Puskesmas	Puskesmas Banjarwangi, Puskesmas Malangbong, Puskesmas Cisompet, Puskesmas Pakuwon, Puskesmas Sukawening	6 Lokasi	18.000.000.000	
114	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kab. Bandung	655.887 orang	119.004.137.280	
115	Percepatan Penurunan Stunting Melalui GEKSSOR (Gerakan KONsumsi Sayur, Susu dan Telor) dan Simpul Pangan Berbasis Komunitas	Arjasari, Cimaung, Banjaran, Pangalengan, Ciparay, Pacet	1 Kegiatan	11.640.923.100	
116	- Pengadaan Kendaraan untuk melaksanakan Edukasi Pengasuhan dan Gizi Ibu dan Anak - Penilaian Praktik Baik Pola Pengasuhan dan Pemenuhan Gizi Ibu dan Anak.	Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Arjasari, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Pacet dan Kecamatan Cimaung	1 Kegiatan	2.000.000.000	
117	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Cicalengka	1 Kegiatan	45.348.850.000	
118	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tipe D	(RSUD Pacira, RSUD Tegalluar dan RSUD Arjasari)	3 Paket	49.162.016.856	
119	Pengembangan Rumah Sakit	Kabupaten Bandung	1 Paket	17.221.416.664	
120	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Majalaya Kabupaten Bandung	1 Paket	19.880.434.665	
121	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Majalaya Kabupaten Bandung	1 Paket	9.123.673.274	
122	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan (PBI)	Kab. Cianjur	114.693	52.024.654.080	
123	Pengembangan Diagnostik Center RSUD Pagelaran	RSUD Pagelaran Kab. Cianjur	4 Paket	40.825.533.000	
124	Peningkatan Fasilitas Ruang Operasi dengan Modular Operating Theater (MOT)	RSUD Sayang Kab. Cianjur	3 Paket	15.000.000.000	
125	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Pelayanan Ruang Rawat Inap	RSUD Sayang Kab. Cianjur	304 Unit	6.261.000.000,00	



No	Usulan (Judul Kegiatan)	Lokus	Volume Kegiatan	Pagu (Rp)	Ket.
126	Pengadaan Prasarana Listrik untuk Rumah Sakit (Energi Terbarukan) Uninterruptible Power Supply (UPS)	RSUD Pagelaran Kab. Cianjur	1 Unit	1.400.000.000	
127	Jaminan Kesehatan bagi PBI peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.	Kabupaten Sukabumi	481.042 peserta	87.280.260.480	
128	Pengembangan Rumah Sakit (pengadaan alat kesehatan/alat kedokteran	RSUD Palabuhanratu	1 Paket	43.748.623.220	
129	Pengembangan Rumah Sakit (pengadaan alat kesehatan/alat kedokteran	RSUD Sekarwangi	1 Paket	52.850.000.000	
130	Pengembangan Rumah Sakit	RSUD Palabuhanratu	1 Paket	4.681.097.226	
131	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Rumah Sakit Sukalarang	1 Paket	67.178.000.000	
132	Peningkatan Puskesmas	Kabupaten Sukabumi	2 Paket	10.470.000.000	
133	Pembangunan Gedung Rumah Sakit	Rumah Sakit Sagaranten	1 Paket	23.149.250.000	
134	Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	Kabupaten Bogor	547724jiwa	99.379.042.560	
135	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung Tahap II	Cogreg Kec. Parung, Kab. Bogor	4kegiatan	206.925.238.000	
136	Pembangunan Gedung Rumah Sakit (Pembangunan Gedung IGD Terpadu)	Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	1 gedung	221.287.533.638	
137	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Rujukan Regional	Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor	1paket	34.535.000.000	
138	Pengadaan Alat Kedokteran Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) RSUD Ciawi	Bendungan, Kec. Ciawi, Kab. Bogor	8jenis	6.534.916.845	
139	Pembangunan Gedung Instalasi Hemodialisa dan Instalasi Bank Darah	Cibeber 1, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor	1gedung	18.204.135.000	
140	Pengajuan Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit Instalasi Bedah Sentral (IBS)	Cibeber 1, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor	8jenis	6.417.543.873	
141	Pengajuan Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit (Instalasi Laboratorium)	Cibeber 1, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor	2jenis	2.600.000.000	
142	Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Leuwiliang (Alat Kedokteran Instalasi Bank Darah)	Cibeber 1, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor	5jenis	628.000.000	
143	Pengajuan Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Rumah Sakit (Instalasi Rawat Jalan)	Cibeber 1, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor	2jenis	1.250.560.000	
144	Pengajuan Pengadaan Alat Kedokteran Rumah Sakit (Instalasi Maternal Neonatal)	Cibeber 1, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor	9jenis	7.150.186.418	
145	Pengadaan Alat Kedokteran RSUD Leuwiliang (Instalasi Rawat Inap)	Cibeber 1, Kec. Leuwiliang, Kab. Bogor	5jenis	2.479.140.800	
146	Pengembangan Rumah Sakit (Pembangunan Gedung IGD Trauma Center)	Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	1gedung	60.245.597.000	
147	Pengembangan Rumah Sakit (Pengadaan Alat Kesehatan)	Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	15jenis	25.411.619.954	
148	Pengembangan Rumah Sakit (Pengadaan Oksigen Generator)	Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	1unit	10.000.000.000	
149	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Kendaraan Ambulance)	Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	2unit	500.000.000	
150	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Alat Kesehatan)	Cipeucang, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	19unit	30.008.798.883	
151	Pengadaan Alat USG 2 Dimensi dan Pelatihan Dokter Puskesmas	Puskesmas : Cibening, Situ Udik, Sirnagalih, Ciderum, Cibulan, Cilebut, Sukamanah, Cibinong, Cicangkal, Gobang, Lebakwangi, Suliwer, Ragajaya, Sadeng Pasar, Kab Bogor	15unit (USG)	2.325.000.000	



Tabel 2.5.2 Usulan Program dan Kegiatan Hibah Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Pengajuan Alat Kesehatan	Jl. Panglayungan No 3, Kota Tasikmalaya	Jumlah alat Kesehatan yang disediakan	Rp 2.599.835.800,-	Klinik Yayasan Kaya Bhakti Swadiri
2	Bantuan keuangan Sarana dan prasarana Palang Merah Indonesia	Jl Otto Iskandar Dinata No 40 A (Kantor PMI), Kab. Cirebon	Jumlah sarana dan prasarana PMI yang disediakan	Rp 13.884.188.327,-	PMI Kab Cirebon
3	Bantuan Dana Hibah Alat Kesehatan dan Alsintor Rumkit Sariningsih TK.IV 03.07.03 Sariningsih Kodam III/Siliwangi Tahun 2024	Jl.L.L.R.E. Martadinata No.9 Bandung, Kota Bandung	Jumlah alat Kesehatan yang disediakan	Rp 39.926.226.000,-	Kodam III Siliwangi
4	Pengembangan dan Implemetasi Aplikasi Mobile Pemantauan Kondisi Kesehatan Ibu Hamil dan 1000 Hari Pertama Anak Untuk Intervensi Gizi Pencegahan Stunting di Jawa Barat	Jl. Ganesha No.10 Bandung, Kota Bandung	Jumlah aplikasi yang dibangun	Rp 2.800.000.000,-	Hibah Kompetitif
5	Sekolah Tangguh Cegah Stunting	Jl. Prof. DR. Bahder Djohan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424, Kota Depok	Jumlah sekolah yang dibangun	Rp 490.176.300,-	Hibah Kompetitif
6	Inovasi Produk Sistik Hati Ayam Dengan Tepung Kulit Telur Ayam Untuk Meningkatkan Status Kesehatan Dan Gizi Remaja	Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Kab. Sumedang	Jumlah inovasi yang dibangun	Rp 192.192.000,-	Hibah Kompetitif
7	Peran Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting: Pendekatan Multifaktorial dalam Tatalaksana Gizi dan Pencegahan Infeksi	Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Kab. Sumedang	Jumlah penelitian yang dilakukan	Rp 888.295.000,-	Hibah Kompetitif
8	Intensifikasi Pemberian MPASI dalam rangka Penurunan Stunting di Jawa Barat: Riset berbasis Quasi Eksperimental	Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Kab. Sumedang	Jumlah penelitian yang dilakukan	Rp 459.682.500,-	Hibah Kompetitif
9	Implementasi Layanan Mobile 'Curhat ASI' Untuk Meningkatkan Gizi Ibu Hamil Dan Menyusui Menuju Tercapainya ASI Eksklusif Di Jawa Barat	Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, Kab. Sumedang	Jumlah ibu hamil yang diberikan pelayanan	Rp 1.012.728.000,-	Hibah Kompetitif
10	Pelatihan Instrumen Dashboard Investment Case Analysis Terkait Implementasi Intervensi	Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten	Jumlah petugas yang diberikan pelatihan	Rp 517.822.500,-	Hibah Kompetitif





BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Fokus penanganan pemerintah pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan pelaksanaan Pemilu 2024. Salah satu arah kebijakan yang terkait Kesehatan adalah peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan. Di samping itu, Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan penyelarasan dengan melakukan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat termasuk faktor-faktor penghambat dan pendorongnya untuk diselaraskan dengan sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2020–2024.

Tabel 3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">Masih adanya kasus kematian ibu dan kematian bayi	<ul style="list-style-type: none">Masih kurangnya sarpras pertolongan persalinan di daerah,masih kurangnya nakes terlatih pertolongan persalinan,kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya antenatal care	<ul style="list-style-type: none">Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan,Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran untuk kesehatan ibu dan anak
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	<ul style="list-style-type: none">Belum adanya grand desain/ rencana induk peningkatan /pengembangan sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan di Jawa Barat.	<ul style="list-style-type: none">Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan,Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Belum optimalnya upaya kesehatan yang dilakukan baik Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : <ul style="list-style-type: none">Masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular	<ul style="list-style-type: none">Masih rendahnya upaya kesehatan promotif dan preventif.Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun penyakit tidak menular.Terjadinya pergeseran penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (Triple Burden diseases).	<ul style="list-style-type: none">Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan,Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Ketersediaan farmasi tidak sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none">Upaya kesehatan promotif dan preventif masih belum menunjukkan peningkatan terhadap penurunan angka kesakitan.Macam layanan dan tenaga kesehatan di FKTP (puskesmas dan klinik swasta) belum cukup efektif dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif yang berdampak terhadap menurunnya	<ul style="list-style-type: none">Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan,Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran



No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Kesehatan	Permasalahan Pelayanan PD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	Analisis Faktor	
			Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM).	
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar	Masih kurangnya kualitas, kuantitas, dan penyebaran SDM Kesehatan	- Perencanaan dan kebijakan pengangkatan PNS tenaga kesehatan masih tersentralisasi di pusat	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran - Adanya Perda Tenaga Kesehatan
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Belum optimalnya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kesehatan	- Belum terjalin kuat hubungan/kerjasama antara pemda dengan filantropi kesehatan dan CSR	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, - Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran, - Jumlah filantropi peduli Kesehatan cukup banyak - Terdapat dana CSR perusahaan untuk kesehatan
		Belum tercapainya target Jaminan Kesehatan menuju <i>Universal Health Coverage</i> (UHC).	- Belum banyak masyarakat yang paham pentingnya jaminan kesehatan	- Adanya kebijakan Pemda yang menjamin masyarakat miskin mendapatkan jaminan kesehatan
7	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	Belum terintegrasinya data sistem informasi kesehatan di tingkat provinsi	- Belum adanya regulasi manajemen system informasi kesehatan provinsi	- Adanya Perda Penyelenggaraan pelayanan kesehatan, - Adanya komitmen pemerintah dalam perencanaan dan penganggaran

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja tahun 2022, ada beberapa isu prioritas yang akan menjadi perhatian pada Renja Tahun 2024. Berikut beberapa isu yang menjadi fokus Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Penurunan jumlah kesakitan dan kematian ibu, anak, dan remaja
2. Pemenuhan dan penatalaksanaan sumber daya kesehatan;
3. Penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular yang komprehensif
4. Penurunan kasus stunting baru;
5. Penerapan SPM Kesehatan;
6. Pencegahan dan pengendalian penyakit AIDS-Tuberculosis-Malaria (ATM) secara konvergensi;
7. Pemanfaatan teknologi (digitalisasi) dalam pelayanan Kesehatan
8. Pengembangan dan penguatan pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan;
9. Pengembangan UOBK Rumah Sakit milik Provinsi Jawa Barat dan Pengelolaan BLUD UPTD dan UOBK RS di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
10. Penelitian dan pengembangan bidang Kesehatan

Berdasarkan isu di atas, Dinas Kesehatan telah merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di tahun 2024 sebagai tahun pertama pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang tertuang di dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat. Ketercapaian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan ini akan diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut :





Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
				2024
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	73,90

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, telah ditetapkan beberapa arahan program dan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2024. Program dan kegiatan prioritas ini difokuskan untuk pencapaian target kinerja :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
2. Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan
3. Program unggulan/prioritas bidang Kesehatan 2024-2026

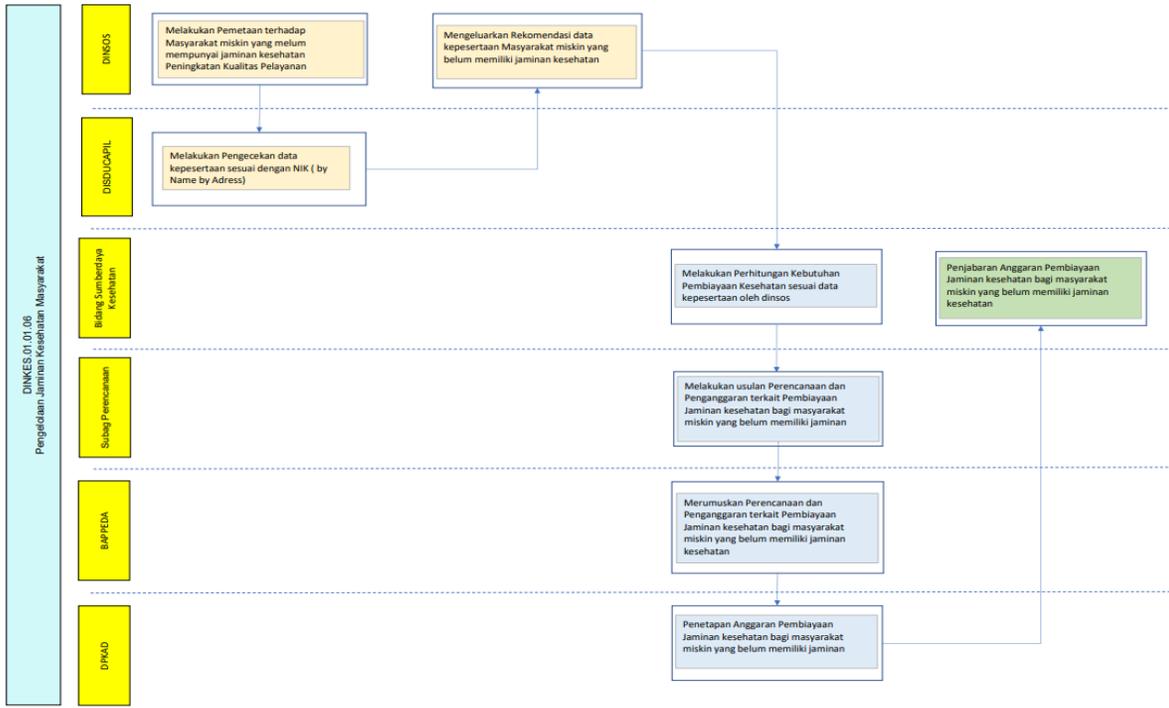
Di samping program prioritas di atas, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga ikut serta di dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat. Melalui Program pembiayaan Kesehatan yang menasar pada penduduk miskin di Kabupaten/Kota, diharapkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan Kesehatan dapat terwujud secara optimal. Dalam melakukan program penanggulangan kemiskinan ini, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Lain yang terkait terutama bersama Dinas Sosial terkait data penduduk miskin dan Dinas Penduduk dan Catatan Sipil dalam hal pengadaan penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai salah satu syarat pemanfaatan pelayanan BPJS. Berikut bagan alur yang menggambarkan keterlibatan Dinas Kesehatan terhadap pencapaian indicator kinerja daerah terkait kemiskinan dan *cross cutting* program penanggulangan kemiskinan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.1 cross cutting program penanggulangan kemiskinan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.





Gambar 3.2 Proses Bisnis Lintas Fungsi untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat





BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

4.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 agar dapat mengatasi permasalahan dan isu kesehatan di Provinsi Jawa Barat.

Berikut strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat :

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI RENSTRA	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Penguatan sistem kesehatan daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan upaya kesehatan dengan memperkuat layanan primer dan rujukan Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan Kesehatan untuk peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan; Meningkatkan jumlah, mutu dan persebaran sumberdaya manusia Kesehatan; Meningkatkan ketahanan farmasi/alat kesehatan dan ketahanan tanggap darurat Menguatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan Menguatkan digitalisasi pengelolaan manajemen data dan informasi serta regulasi Kesehatan Meningkatkan sistem pengendalian dan penguatan pengawasan di Bidang Kesehatan. Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan serta pemanfaatannya
		Penerapan SPM sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelaksanaan SPM secara terpadu
		Peningkatan pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPTD/UOBK RS Meningkatkan kualitas dan perluasan layanan RS provinsi Memperkuat pembinaan dan pengelolaan BLUD pada UPTD Dinas Kesehatan
		Penguatan dan percepatan intervensi konvergensi stunting	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat dan mempercepat Intervensi Spesifik dan Sensitif terintegrasi lingkup Kesehatan

Strategi dan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah mengadaptasi pesan transformasi kesehatan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh pemerintah pusat agar transformasi Kesehatan yang akan dilakukan di Provinsi Jawa Barat dapat mendukung tercapainya target yang diharapkan.

Selain itu, strategi dan arah kebijakan ini juga menjadi arah bagi pelaksanaan program unggulan/prioritas bidang Kesehatan 2024-2026, yaitu:

1. Penguatan Sistem Kesehatan Daerah

a. Layad rawat

Mendorong kesinambungan dan kemandirian Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan Layad rawat melalui kegiatan advokasi kepada Kepala daerah Kabupaten/ Kota untuk dukungan penyelenggaraan *Call Center* PSC 119 sebagai upaya peningkatan penanggulangan gawat darurat terpadu, penguatan program Layad rawat, pembinaan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Layad rawat, monitoring serta evaluasi.





b. Pembangunan dan revitalisasi UOBK Rumah Sakit dan UPTD

Pembangunan gedung dan perbaikan gedung rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan Kesehatan rujukan di UOBK Provinsi dan daerah kabupaten/kota terutama di daerah perbatasan yang menjadi kewajiban provinsi, pengembangan pelayanan Kesehatan di wilayah pengembangan dan pusat kegiatan lokal, meningkatkan sarana prasarana, alat kesehatan rumah sakit dan puskesmas sesuai dengan standar. Membantu kab/kota dalam pembangunan rumah sakit baru dalam upaya peningkatan/pemerataan akses pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan rasio jumlah tempat tidur perawatan dengan jumlah penduduk di wilayah kabupaten/kota. Pembangunan dan revitalisasi rumah sakit meliputi pembangunan rumah sakit baru, merevitalisasi rumah sakit yang kurang layak, dan melakukan revitalisasi rumah sakit terutama Rumah Sakit milik Provinsi dalam rangka penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit terutama untuk layanan 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan urologi) dan sarana rumah sakit mampu PONEK;

c. Jaminan kesehatan masyarakat miskin yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional (JKN).

Membantu subsidi pembayaran premi jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa Penerima Bantuan Iuran Daerah Provinsi dan mengalokasikan anggaran pembiayaan dan jaminan kesehatan daerah pada rumah sakit milik Provinsi Jawa Barat.

d. Penanganan Stunting

Penguatan dan percepatan intervensi konvergensi stunting membutuhkan dukungan Kerjasama berbagai pihak mengingat target Jawa Barat yang ditetapkan oleh pusat di tahun 2024 adalah 14%. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun *logical framework* penurunan prevalensi stunting di Jawa Barat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kesehatan menyusun rencana aksi penurunan stunting agar setiap program/kegiatan terarah dan dapat dipantau ketercapaian target yang diharapkan.

e. Cakupan Imunisasi Rutin Lengkap

Program Imunisasi tahun 2024-2026 difokuskan untuk meningkatkan cakupan Imunisasi Rutin Lengkap meliputi Imunisasi Dasar pada Bayi, bayi di bawah 2 (dua) tahun) dan Imunisasi anak usia sekolah di Jawa Barat. Semua anak memiliki akses dan kesempatan mendapatkan imunisasi (tanpa memandang status sosial, ekonomi, geografis, dan jenis kelamin).

f. Pemenuhan 9 (Sembilan) Tenaga Kesehatan di Puskesmas.

Posisi Jawa Barat yang berada di level terbawah di antara provinsi di pulau Jawa dengan capaian hanya sekitar 50,23% per Februari 2023 menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan akselerasi pengadaan 9 jenis nakes sesuai standar melalui fasilitasi internal (redistribusi, pengembangan karir, peningkatan kompetensi) dan fasilitasi eksternal pendayagunaan tenaga kesehatan.

g. Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Obat-obatan dan Pemenuhan SPM

Jawa Barat masih menghadapi penyakit menular yang belum teratasi, penyakit baru baik penyakit menular maupun tidak menular, dan penyakit yang sudah hilang muncul kembali. Jawa Barat juga perlu meningkatkan kesiapan pelayanan



kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, KLB dan/atau berpotensi KLB/Bencana Provinsi, serta penguatan sistem ketahanan kesehatan daerah melalui penatalaksanaan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

2. Program Prioritas Lainnya

Amanat lainnya yang perlu diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan dan melaksanakan indikator program pemanfaatan ruang yang diamanatkan di dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2042 yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Kesehatan Provinsi agar dapat mengawal dan melakukan optimalisasi pelayanan Kesehatan di wilayah pengembangan, pusat-pusat kegiatan dan wilayah perbatasan baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi yang berbatasan. Hal ini dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa dibatasi wilayah sesuai sasaran Dinas Kesehatan sampai dengan tahun 2026 ke depan.

Program prioritas lainnya juga berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang harus menterjemahkan prioritas pembangunan bidang kesehatan yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah.

4.2 Program dan Kegiatan

Dengan mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Bidang dan UOBK/UPTD yang ada pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Program dan Kegiatan Pembangunan Kesehatan Tahun 2024 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Program dan Kegiatan tersebut disusun mengacu ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kesehatan akan melakukan adaptasi program/kegiatan terhadap 6 pilar tersebut melalui program prioritas/unggulan Kesehatan dalam rangka memperkuat Sistem Kesehatan Daerah sesuai prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang kesehatan tahun 2024.

Arahan program Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026 dengan mengadaptasi program Transformasi Kesehatan, sebagai berikut:

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan
2. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Pembiayaan Kesehatan
4. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
5. Pemenuhan dan Penatalaksanaan Sumber Daya Kesehatan
6. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
7. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Tabel 4.2 Sandingan Program Transformasi Kesehatan dan Program Prioritas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Tranformasi Kesehatan	Program Prioritas
1	Transformasi Layanan Primer	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Upaya Kesehatan • Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
2	Transformasi Layanan Rujukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Upaya Kesehatan
3	Transformasi Ketahanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan dan Penatalaksanaan Sumber Daya Kesehatan • Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Penelitian dan Pengembangan Kesehatan



No	Tranformasi Kesehatan	Program Prioritas
4	Transformasi SDM Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5	Transformasi Pembiayaan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Pembiayaan Kesehatan
6	Transformasi Teknologi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Digitalisasi Pelayanan Kesehatan• Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026 terdapat arahan kegiatan prioritas yang perlu menjadi perhatian dalam merumuskan program dan kegiatan, yaitu:

1. Pembangunan RS khususnya pada kawasan metropolitan REBANA dan Jabar Selatan
2. Peningkatan layanan puskesmas menjadi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (DTP) dan Puskesmas PONED
3. Pemenuhan alat kesehatan RS dan Puskesmas
4. Pengobatan TB
5. Eliminasi Malaria
6. Pengobatan HIV/AIDS
7. Pemberian makanan tambahan kepada Balita dan ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
8. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Remaja Putri
9. Deteksi dini penyakit
10. Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) melalui penugasan khusus
11. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM
12. Kontribusi PBI-JK dan Bankeu Jaminan Kesehatan untuk PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah
13. Layanan *Call Center* (Layad Rawat)
14. Peningkatan Gerakan Masyarakat Sehat melalui 5 kluster Germas

Selain arahan kegiatan prioritas di atas, beberapa indikasi program pemanfaatan ruang yang menjadi tugas Dinas Kesehatan untuk mengawal dan melaksanakannya, diantaranya :

- a. Wilayah Pengembangan : penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di WP Bodebekjur, Ciayumajakuning, Purwasuka, Sukabumi dan sekitarnya, Priangan Timur-Pangandaran, dan Cekungan Bandung.
- b. Pusat-pusat Kegiatan :
 - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKN yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe A.
 - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKW yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe B
 - Pemenuhan sarana dan prasarana minimal di PKL yaitu pembangunan Rumah Sakit Tipe C
 - Pembangunan puskesmas PONED
- c. Wilayah perbatasan :
 - Kerjasama dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular bagi masyarakat di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Kuningan)
 - Kerjasama dalam pembiayaan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Tengah
 - Kerjasama dalam pengendalian dan pencegahan penyakit menular (Cilacap dan Brebes).

Dengan mendasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi, dan prioritas daerah melalui program prioritas daerah tahun 2024 yaitu Kesehatan Unggul: 1. Fasilitas dan Layanan Kesehatan 2. Promosi Kesehatan 3. Jaminan Kesehatan, dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh bidang dan UPTD yang ada pada struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan tahun 2024 disusun untuk memberikan arah





dan pedoman bagi penyelenggara pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Barat terkait dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berdasarkan kewenangan berjumlah 5 program, 18 kegiatan, dan 69 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran program adalah meningkatnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, meningkatnya kesehatan keluarga, meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, terkendalinya penyakit menular dan tidak menular, terkendalinya penyakit pada saat bencana dan KLB, meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat. Adapun kegiatan, sebagai berikut :

1. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya layanan perorangan dan masyarakat
3. Meningkatnya layanan kesehatan lingkungan
4. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas
5. Terbangunnya penguatan tata Kelola rumah sakit
6. Terlayannya Kesehatan di waktu bencana/KLB, meningkatnya layanan
7. Tersedianya pembiayaan dan jaminan kesehatan
8. Meningkatnya layanan kesehatan di lingkungan RSUD Al Ihsan

dengan Sub Kegiatan:

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu dan anak;
- 2) Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan gizi masyarakat ;
- 3) Pengelolaan Kesehatan usia produktif dengan sasaran terlaksananya pengelolaan kesehatan usia produktif ;
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan usia lanjut;
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan Kesehatan lingkungan;
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan haji;
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga;
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular;
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan masalah Kesehatan jiwa (ODMK);
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
- 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat KLB dan/atau berpotensi KLB;
- 12) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan sasaran terlaksananya pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat;
- 13) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan dengan sasaran terbinanya pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan;





- 14) Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pendampingan fasilitasi pelayanan kesehatan;
- 15) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan sasaran tersedianya dan terkelolanya Public Safety Center (PSC) 119 yang terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu system penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT);
- 16) Pengelolaan surveilans Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan surveilans Kesehatan;
- 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat;
- 18) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus dengan sasaran terlaksananya pengelolaan pelayanan Kesehatan khusus;
- 19) Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan sasaran tersedianya operasional pelayanan rumah sakit.;
- 20) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat RSUD Al Ihsan

2. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan medik sesuai standar di RSUD Pameungpeuk
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perawatan sesuai standar di RSUD Pameungpeuk
3. Meningkatnya pelayanan penunjang medik di RSUD Pameungpeuk
4. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan di RSUD Al Ihsan dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan dengan sasaran tersedianya prasarana fasilitas layanan Kesehatan;
 - 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan sasaran tersedianya alat kesehatan/alat penunjang medis fasilitas layanan Kesehatan;
 - 3) Pengembangan Rumah Sakit dengan sasaran tersedianya rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit;
 - 4) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya dengan sasaran tersedianya bahan habis pakai lainnya sprei, handuk, dan habis pakai lainnya);
 - 5) Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya dengan sasaran terpenuhinya rumah sakit dengan rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000;
 - 6) Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan sasaran tersedianya fasilitas Kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar;
 - 7) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan sasaran terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat Kesehatan pada fasilitas Kesehatan lainnya;
 - 8) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan dengan sasaran terpeliharanya alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan Kesehatan;
 - 9) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan sasaran tersedianya obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas kesehatan lainnya;
 - 10) Distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya dengan sasaran terlaksananya distribusi alat Kesehatan, obat, vaksin, makanan dan minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya;
 - 11) Pengembangan Rumah Sakit RSUD Al Ihsan;





- 12) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan RSUD Al Ihsan;
 - 13) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) RSUD Al Ihsan.
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi, dengan sasaran tersedianya sistem informasi Kesehatan yang terintegrasi, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan data dan informasi Kesehatan;
 - 2) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pengelolaan system informasi Kesehatan.
 4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat dengan sasaran tersedianya rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perijinannya, dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan sasaran terlaksananya peningkatan mutu pelayanan fasilitas Kesehatan;
 - 2) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dengan sasaran terlaksananya peningkatan tata Kelola rumah sakit;
 - 3) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sasaran meningkatnya tata Kelola rumah sakit sesuai standar.

II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan sasaran program adalah meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi dengan sasaran meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dan meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan dan pemenuhan tenaga kesehatan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia Kesehatan di fasilitas Kesehatan yang memenuhi standar;
 - 2) Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terlaksananya distribusi dan pemerataan sumber daya manusia Kesehatan.
2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran meningkatnya kompetensi sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah provinsi, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terlaksananya pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan;
 - 2) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan sasaran terlaksananya peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan.

III. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan sasaran program adalah meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

1. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) dengan sasaran meningkatnya sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) yang terverifikasi, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK dengan sasaran terbinaanya pelaku usaha Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)





2. Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dengan sasaran terlaksananya pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT), dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional terbinanya pelaku usaha sarana usaha kecil obat tradisional (UKOT) sesuai standar.

IV. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan sasaran program adalah meningkatnya perilaku hidup sehat, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan. Adapun kegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran meningkatnya partisipasi mitra dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran terlaksananya advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat provinsi
2. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan sasaran meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan sasaran terselenggaranya promosi Kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat.

V. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program adalah terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Adapun kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan sasaran tersusunnya dokumen perencanaan Dinas Kesehatan;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan sasaran tersedianya dokumen RKA dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA Dinas Kesehatan;
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan sasaran tersedianya dokumen DPA Dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA Dinas Kesehatan;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan sasaran tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Kesehatan.
 - 5) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan sasaran tersusunnya dokumen perencanaan program dan evaluasi pelaporan di lingkungan RSUD Al Ihsan
2. Administrasi Keuangan dengan sasaran terlaksananya administrasi keuangan Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan sasaran tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan;
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan sasaran tersedianya gaji dan tunjangan ASN;
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan sasaran terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dinas Kesehatan;





- 4) Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan sasaran tersedianya laporan bulanan/triwulanan/semesteran Dinas Kesehatan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester Dinas Kesehatan.
3. Administrasi Kepegawaian dengan sasaran terlaksananya administrasi kepegawaian Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan sasaran terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan sasaran terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sasaran terlaksananya administrasi umum Dinas Kesehatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan sasaran tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan sasaran tersedianya barang cetakan dan penggandaan;
 - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan sasaran terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan;
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan sasaran tersedianya peralatan rumah tangga;
 - 5) Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan sasaran terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu;
 - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan sasaran tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD Al Ihsan;
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RSUD Al Ihsan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sasaran terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan sasaran tersedianya sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 2) Pengadaan Mebel RSUD Al Ihsan;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan sasaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan sasaran tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan sasaran tersedianya jasa pelayanan umum kantor.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan sasaran tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;





- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya;
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan sasaran terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya.
8. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sasaran meningkatnya pelayanan BLUD, dengan sub kegiatan :
- 1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan sasaran tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan;
 - 2) Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD dilaksanakan merujuk pada kebutuhan Renstra masing-masing Rumah Sakit UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan pendanaan bersumber dari pendapatan jasa pelayanan BLUD
 - 3) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Al Ihsan.



Tabel 4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
					TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING								
					MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT								
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT										7.506.052.571			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase kab/kota dengan target IKS> 60%	persen	3,70		5.163.200.460		
							Persentase Kab/kota yang melaksanakan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan	persen	18,00		622.151.840		
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase kab/kota yang melakukan pengelolaan/penerapan indikator keluarga sehat 100 persen	persen	100,00		5.023.200.460		
							Persentase Kab Kota yang melaksanakan program STBM	persen	37,00		622.151.840		
							Persentase Jemaah Haji Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Haji	persen	100,00		140.000.000		
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	dokumen	6,00	Provinsi Jawa Barat	2.214.478.200	PAD	
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	dokumen	1,00	Provinsi Jawa Barat	157.340.100	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	dokumen	1,00	Provinsi Jawa Barat	152.796.100	PAD	
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	dokumen	16,00	Provinsi Jawa Barat	2.338.586.060	PAD	
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	dokumen	3,00	Provinsi Jawa Barat	160.000.000	PAD	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	7,00	Provinsi Jawa Barat	622.151.840	PAD	
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	dokumen	5,00	Provinsi Jawa Barat	140.000.000	PAD	
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Kabupaten/Kota dengan cakupan rumah tangga ber-PHBS >80%	persen	70,00		1.027.697.866		
							Persentase Kerjasama/kemitraan Tingkat Daerah Provinsi (Evaluasi Pelaksanaan dan Implementasi PKS-nya)	persen	5,00		833.002.405		
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya advokasi Kesehatan, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat, dan lintas sector tingkat daerah provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan Kebijakan Germas	persen	92,59		833.002.405		
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	dokumen	6,00	Provinsi Jawa Barat	833.002.405	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persen	92,59		1.027.697.866		
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	dokumen	8,00	Provinsi Jawa Barat	1.027.697.866	PAD	
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											447.214.922.931		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Penduduk yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Menuju Universal Health Coverage (UHC) Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial	persen	96,00		377.796.218.432		
								persen	92,59		38.961.522.105		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Obat dan BMHP di Fasilitas Kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang terdistribusi Obat dan BMHP	persen	100,00		38.961.522.105		
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	dokumen	27,00	Provinsi Jawa Barat	727.524.105	PAD; Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	27,00	Provinsi Jawa Barat	38.233.998.000	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat	Persentase kab/kota yang mencapai UHC	persen	55,56		377.796.218.432		
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	12,00	Provinsi Jawa Barat	377.796.218.432	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kapasitas Tenaga Kesehatan di Provinsi Jawa Barat	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi standar ketenagaan minimal di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah	persen	55,10		30.169.929.494	PAD	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Wilayah Kab/Kota Minimal 80% yang memiliki Tenaga Kesehatan teregistrasi yang aktif bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan	persen	67,00		29.088.697.700	PAD	
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	orang	2.505,00	Provinsi Jawa Barat	29.088.697.700	PAD	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang sesuai Anjab/ABK	persen			1.081.231.794	PAD	
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	dokumen	5,00	Provinsi Jawa Barat	1.081.231.794	PAD	
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya Kualitas Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persentase sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK), Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) sesuai standar perizinan	persen	92,00		287.252.900	PAD	
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang, Sarana Cabang Distributor Alat Kesehatan (DAK), Sarana Pedagang Besar Kosmetika (PBK) dan Sarana Pedagang Besar Obat Tradisional (PBOT)	Persentase sarana PBF Cabang, cabang DAK, PBK dan PBOT yang diawasi dan dikendalikan dalam rangka penerbitan dan tindaklanjut perizinan	persen	70,00		274.170.800	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	sarana	90,00	Provinsi Jawa Barat	274.170.800	PAD	
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Terlaksananya pengendalian dan pengawasan sarana UKOT dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan perizinan UKOT	Persentase sarana UKOT yang diawasi dan dikendalikan dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut perizinan	persen	90,00		13.082.100	PAD	
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	sarana	35,00	Provinsi Jawa Barat	13.082.100	PAD	
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN											8.650.023.909	PAD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Kabupaten/Kota dengan fasilitas kesehatan sesuai standar	persen	67,24		8.650.023.909	PAD	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						5.852.062.469	PAD	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	unit	1	Provinsi Jawa Barat	5.852.062.469	PAD	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Kab/Kota Dengan Tata kelola FKTP Sesuai Standar				2.020.768.520	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
									1	02	02	1.02	
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	dokumen	71	Provinsi Jawa Barat	288.158.240	PAD	
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	unit	23	Provinsi Jawa Barat	1.620.616.680	PAD	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				777.192.920	PAD	
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	unit	90	Provinsi Jawa Barat	106.534.000	PAD	
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	unit	27	Provinsi Jawa Barat	282.218.960	PAD	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	2.954	Provinsi Jawa Barat	388.439.960	PAD	
BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT											4.765.050.486	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Presentasi kab/kota yang menurun angka prevalensi penyakit menular dan tidak menular	persen	85		4.765.050.486	PAD	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penatalaksanaan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Obat-obatan dan Pemenuhan SPM	Persentase kab/kota yang menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persen	92,60		3.510.105.441	PAD	
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis akibat bencana dan/atau potensi bencana	persen	100,00		546.534.535	PAD	
							Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB	persen	92,60		34.530.690	PAD	
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	orang	148.661	Provinsi Jawa Barat	546.534.535	PAD	
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	orang	1.280	Provinsi Jawa Barat	34.530.690	PAD	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	25	Provinsi Jawa Barat	3.510.105.441	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	dokumen	6	Provinsi Jawa Barat	136.904.920	PAD	
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	dokumen	12	Provinsi Jawa Barat	313.744.900	PAD	
1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Penatalaksanaan Penanganan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Obat-obatan dan Pemenuhan SPM	Persentase kab/kota yang menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	persen	92,60		-	PAD	
1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	Provinsi Jawa Barat	N/A	PAD	
1	02	02	3.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	Provinsi Jawa Barat	N/A	PAD	
1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	-	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	-	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
1	02	02	3.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	Provinsi Jawa Barat	N/A	PAD	
1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	-	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
1	02	02	3.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
1	02	02	3.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Cacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
1	02	02	3.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	-	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
1	02	02	3.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	dokumen	N/A	Provinsi Jawa Barat	N/A	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	3.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	dokumen	-	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
1	02	02	3.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	dokumen	-	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
1	02	02	3.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	dokumen	-	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
SEKRETARIAT											732.163.787.849	PAD	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Terlaksananya administrasi penunjang di Dinas Kesehatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	point	87,20		731.685.157.969	PAD	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada Dinas Kesehatan	persen	100		2.067.888.182	PAD	
1	2	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	Provinsi Jawa Barat	1.676.582.565	PAD	
1	02	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	2	Provinsi Jawa Barat	208.259.150	PAD	
1	02	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	3	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	5	Provinsi Jawa Barat	183.046.467	PAD	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan Dinas Kesehatan	Persentase Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	persen	100		732.357.626.813	PAD	
1	02	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang / bulan	600	Provinsi Jawa Barat	706.123.311.493	PAD	
1	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	Provinsi Jawa Barat	135.783.200	PAD	
1	02	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	Provinsi Jawa Barat	611.166.400	PAD	
1	02	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	Provinsi Jawa Barat	500.050.400	PAD	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian Daerah Dinas Kesehatan	Persentase Administrasi Kepegawaian Dinas Terpenuhi	persen	100		2.921.214.710	PAD	
1	02	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	26	Provinsi Jawa Barat	2.071.774.710	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	300	Provinsi Jawa Barat	500.000.000	PAD	
1	02	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	55	Provinsi Jawa Barat	349.440.000	PAD	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum Dinas Kesehatan	Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	persen	100		4.708.171.325	PAD	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	Provinsi Jawa Barat	535.451.622	PAD	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	3	Provinsi Jawa Barat	429.692.100	PAD	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	Provinsi Jawa Barat	3.743.027.603	PAD	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100		7.398.459.716	PAD	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	5	Provinsi Jawa Barat	2.144.000.000	PAD	
1	02	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	10	Provinsi Jawa Barat	672.760.037	PAD	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	10	Provinsi Jawa Barat	4.581.699.679	PAD	



Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
									TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di Dinas Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100		6.598.368.909	PAD	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	112	Provinsi Jawa Barat	760.000.000	PAD	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	6	Provinsi Jawa Barat	3.410.344.471	PAD	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	327	Provinsi Jawa Barat	2.428.024.438	PAD	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di Dinas Kesehatan	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	80		1.287.439.000	PAD	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	100	Provinsi Jawa Barat	-	PAD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Kesehatan di Jawa Barat	persen	100		354.918.367	PAD	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan	Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	persen	100		354.918.367	PAD	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	Provinsi Jawa Barat	354.918.367	PAD	
UOBK RSUD AL IHSAN											453.342.266.345	PAD	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas tatakelola Rumah Sakit Pada RS Al-Ihsan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	poin	97,10		425.721.649.000	PAD	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00		425.721.649.000	PAD	



Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
									TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM terhadap Pelayanan RSUD Al Ihsan	poin	97,10	Kabupaten Bandung	425.721.649.000	Pendapatan dari BLUD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada RSUD Al Ihsan	Indikator Nasional Mutu di RSUD Al Ihsan	persen	69,00		27.620.617.343	PAD	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan medik di RSUD Al Ihsan	INM Bidang Medis tercapai sesuai target	persen	75,00		13.599.195.903	PAD	
1	2	2	1,01	3	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Bangunan/gedung pelayanan kesehatan	Jumlah bangunan / Gedung pelayanan kesehatan yang di bangun	Gedung	-	Kabupaten Bandung	-	PAD	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit/paket	1,00	Kabupaten Bandung	13.599.195.903	DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang di RSUD Al Ihsan	INM Bidang Penunjang tercapai sesuai target	persen	75,00		14.021.421.440	PAD	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1,00	Kabupaten Bandung	14.021.421.440	PAD	
UOBK RS JIWA											66.056.179.813	PAD	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan perencanaan, keuangan dan umum pada UOBK RS Jiwa	IKM atas pelayanan perencanaan, keuangan dan umum RS Jiwa	poin	87,00		51.224.822.053	PAD	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum RS Jiwa	Persentase Administrasi Umum di RS Jiwa Yang Terpenuhi	persen	100		490.293.871	PAD	
1	02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12,00	Kabupaten Bandung Barat	150.000.000	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12,00	Kabupaten Bandung Barat	340.293.871	PAD	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	80		-	PAD	
1	02	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	1,00	Kabupaten Bandung Barat	-	PAD	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100		12.314.706.129	PAD	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12,00	Kabupaten Bandung Barat	12.314.706.129	PAD	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00		38.419.822.053	PAD	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1,00	Kabupaten Bandung Barat	38.419.822.053	Pendapatan dari BLUD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan medik, keperawatan dan penunjang pada UOBK RS Jiwa	IKM atas pelayanan medik, keperawatan dan penunjang RS Jiwa	poin	87,00		6.500.000.000	PAD	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RS Jiwa	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan medik sesuai standar	persen	100,00		500.000.000	PAD	
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	unit	-	Kabupaten Bandung Barat	-	PAD	
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	unit	-	Kabupaten Bandung Barat	-	PAD	



Uru san	Bid ang Uru san	KODE			URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
		Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	12,00	Kabupaten Bandung Barat	500.000.000	PAD	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	100,00		6.000.000.000	PAD	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	12,00	Kabupaten Bandung Barat	6.000.000.000	PAD	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RS Jiwa	Persentase Dokumen Data dan Informasi Kesehatan	persen	-		-	PAD	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	-	Kabupaten Bandung Barat	-	PAD	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, pengembangan sdm, pendidikan, penelitian dan pengembangan	IKM pelayanan kepegawaian, pengembangan sdm, pendidikan, penelitian dan pengembangan RS Jiwa	pojn	87,00		3.141.357.760	PAD	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Tersusunnya rencana kebutuhan pegawai	Jumlah rencana Kebutuhan Pegawai yang tersusun	dokumen	1,00		3.141.357.760	PAD	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	12,00	Kabupaten Bandung Barat	3.141.357.760	PAD	
UOBK RSUD JAMPANGKULON											100.246.153.751	PAD	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Peningkatan Pelayanan Administrasi umum dan Keuangan Pada RSUD Jampangkulon	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	persen	100,00		67.443.318.987	PAD	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Jampangkulon	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	80		1.634.352.600	PAD	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2,00	Kabupaten Sukabumi	1.634.352.600	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di RSUD Jampangkulon	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100		-	PAD	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	-	Kabupaten Sukabumi	-	PAD	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00		65.808.966.387	PAD	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1,00	Kabupaten Sukabumi	65.808.966.387	Pendapatan dari BLUD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan pada RSUD Jampangkulon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Jampangkulon	persen	82,75		17.802.834.764	PAD	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Jampangkulon	Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayanan Medik dan Asuhan keperawatan Sesuai Standar	persen	74,90		14.802.834.764	PAD	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	50,00	Kabupaten Sukabumi	12.585.834.764	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	unit	1,00	Kabupaten Sukabumi	2.217.000.000	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Jumlah Dokumen Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	-	Kabupaten Sukabumi	-	PAD	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	100,00		2.000.000.000	PAD	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	350,00	Kabupaten Sukabumi	2.000.000.000	PAD	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RSUD Jampangkulon	Persentase layanan yang memanfaatkan sistem informasi	persen	100,00		1.000.000.000	PAD	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	85,00	Kabupaten Sukabumi	1.000.000.000	PAD	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Jampang Kulon yang Memenuhi Standar		-	-		15.000.000.000	PAD	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan RSUD Jampangkulon	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	orang	-		15.000.000.000	PAD	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	32,00	Kabupaten Sukabumi	15.000.000.000	PAD	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan yang meningkat kapasitasnya	persen	-		-	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tersedianya Jumlah Dokumen Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan	dokumen	-	Kabupaten Sukabumi	-	PAD	
UOBK RSUD PAMEUNGPEUK											74.196.224.646	PAD	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian dan umum pada RSUD Pameungpeuk	SPM lingkup umum dan kepegawaian tercapai sesuai standar	persen	100,00		44.566.174.646	PAD	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum RSUD Pameungpeuk	Persentase Administrasi Umum di Dinas Kesehatan Yang Terpenuhi	persen	100		-	PAD	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit	-	Kabupaten Garut	-	PAD	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Pameungpeuk	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	80		1.000.000.000	PAD	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1,00	Kabupaten Garut	1.000.000.000	PAD	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100,00		43.566.174.646	PAD	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1,00	Kabupaten Garut	43.566.174.646	Pendapatan dari BLUD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RSUD Pameungpeuk	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RSUD Pameungpeuk	point	86,95		14.500.000.000		
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RSUD Pameungpeuk	Persentase Pasien Yang Terlayani Pelayanan Medik dan Asuhan keperawatan Sesuai Standar	persen	100,00		8.500.000.000		
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Gedung Poli-Ranap di RSUD Pameungpeuk	Jumlah Gedung Poliranap	unit	-	Kabupaten Garut	-	PAD	
						Tersedianya Gedung IGD di RSUD Pameungpeuk	Jumlah Gedung IGD	Unit	-	Kabupaten Garut	-	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	51,00	Kabupaten Garut	8.500.000.000	DBHCHT, DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP dan Obat-obatan yang Disediakan	paket	-	Kabupaten Garut	-	PAD	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Persentase Pasien Yang Terlayani Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	100,00		6.000.000.000	PAD	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1,00	Kabupaten Garut	6.000.000.000	PAD	
1	02	02	1.02	0016	Pengembangan Kesehatan Lingkungan di RSUD Pameungpeuk	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Lingkungan (Sampah Medis dan Non Medis , Uji Kesehatan Lingkungan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	-	Kabupaten Garut	-	PAD	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Pameungpeuk yang Memenuhi Standar		-	-		15.130.050.000	PAD	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	-	-		15.130.050.000	PAD	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	268,00	Kabupaten Garut	15.130.050.000	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
UPTD RS PARU PROVINSI											69.245.171.586	PAD	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan Umum dan Keuangan pada RS Paru	SPM lingkup umum dan keuangan RS Paru tercapai sesuai standar	persen	100		22.851.059.026	PAD	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang di RS Paru	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100		7.025.000.000	PAD	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	Kabupaten Cirebon	2.025.000.000	PAD	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	Kabupaten Cirebon	5.000.000.000	PAD	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di RS Paru	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100		1.611.263.229	PAD	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	20	Kabupaten Cirebon	867.407.700	PAD	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	10	Kabupaten Cirebon	743.855.529	PAD	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100		14.214.795.797	PAD	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	Kabupaten Cirebon	14.214.795.797	PAD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada UOBK RS Paru	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan RS Paru	persen	90,20		32.300.000.000	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RS Paru	Terpenuhinya alat dan proses pelayanan sesuai dengan standar	persen	100		31.500.000.000	PAD	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Bangunan/gedung pelayanan kesehatan	Gedung pelayanan kesehatan yang di bangun	unit	-	Kabupaten Cirebon	-	PAD	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	1	Kabupaten Cirebon	31.500.000.000	PAD	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	Terpenuhinya prasarana, sarana, obat, BHP, Reagen dan makan minum untuk menunjang penegakan diagnostik dan perawatan pasien	persen	100		800.000.000	PAD	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	12	Kabupaten Cirebon	800.000.000	PAD	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru yang Memenuhi Standar	Persentase pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru	persen	100		14.094.112.560	PAD	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RS Paru yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	persen	100		14.094.112.560	PAD	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	90	Kabupaten Cirebon	14.094.112.560	PAD	
UPTD RSUD KESEHATAN KERJA											42.941.154.620	PAD	



Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
									TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas pelayanan Umum dan Keuangan pada RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan Administrasi Perencanaan, Kepegawaian dan Keuangan di RSUD Kesehatan Kerja	persen	100		21.769.041.907	PAD	
1	02	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Sesuai Ketentuan pada RSUD Kesehatan Kerja	persen	100		100.000.000	PAD	
1	02	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	Kabupaten Bandung	100.000.000	PAD	
1	02	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Laporan Keuangan RSUD Kesehatan Kerja Yang Disusun Tepat Waktu	persen	100		50.000.000	PAD	
1	02	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	Kabupaten Bandung	50.000.000	PAD	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Administrasi umum RSUD Kesehatan Kerja yang terpenuhi	persen	100		2.379.982.611	PAD	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	10	Kabupaten Bandung	524.322.414	PAD	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	Kabupaten Bandung	285.794.236	PAD	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5	Kabupaten Bandung	835.541.749	PAD	
1	02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	12	Kabupaten Bandung	734.324.212	PAD	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100		5.664.019.039	PAD	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	Kabupaten Bandung	800.000.000	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	Kabupaten Bandung	4.864.019.039	PAD	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100		2.266.575.000	PAD	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	16	Kabupaten Bandung	266.575.000	PAD	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	Kabupaten Bandung	1.000.000.000	PAD	
1	02	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	167	Kabupaten Bandung	1.000.000.000	PAD	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	80		2.817.002.850	PAD	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	1	Kabupaten Bandung	1.977.909.000	PAD	
1	02	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	1	Kabupaten Bandung	313.182.700	PAD	
1	02	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	Kabupaten Bandung	525.911.150	PAD	
1	02	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Persentase tercapainya sarana dan prasarana umum rumah sakit	persen	100		8.491.462.407	PAD	
1	02	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	unit kerja	1	Kabupaten Bandung	8.491.462.407	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan pada RSUD Kesehatan Kerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan Kerja	persen	85		10.874.499.798	PAD	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM lingkup pelayanan sesuai standar	persen	83		7.080.483.213	PAD	
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	unit	22	Kabupaten Bandung	3.569.687.850	PAD	
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	unit	429	Kabupaten Bandung	500.000.000	PAD	
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	unit	-	Kabupaten Bandung	-	PAD	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	23	Kabupaten Bandung	3.010.795.363	PAD	
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang medik sesuai standar	SPM penunjang medik dan non medik sesuai standar	persen	80		3.443.227.085	PAD	
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	dokumen	5	Kabupaten Bandung	1.972.277.085	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	dokumen	1	Kabupaten Bandung	300.000.000	PAD	
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	dokumen	1	Kabupaten Bandung	800.000.000	PAD	
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	dokumen	2	Kabupaten Bandung	370.950.000	PAD	
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemanfaatan Sistem Informasi dalam pelayanan Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja	Persentase Layanan Yang Memanfaatkan Sistem Informasi	persen	100		350.789.500	PAD	
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	dokumen	1	Kabupaten Bandung	350.789.500	PAD	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan pengetahuan di RSUD Kesehatan Kerja	persen	60		10.297.612.915	PAD	
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Kesehatan Kerja	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar	persen	100		9.828.612.915	PAD	
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	orang	110	Kabupaten Bandung	9.828.612.915	PAD	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase Tenaga Kesehatan yang meningkat kapasitasnya	persen	53,53		469.000.000	PAD	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	orang	91		469.000.000	PAD	
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN											29.009.697.109	PAD	



Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegia tan	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
									TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang UPTD Labkes	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang UPTD Labkes	persen	100		9.362.447.109	PAD	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi		100		3.050.848.843	PAD	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	2	Kota Bandung	63.514.000	PAD	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	Kota Bandung	265.385.000	PAD	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	3	Kota Bandung	196.062.400	PAD	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	Kota Bandung	386.170.000	PAD	
1	02	01	1.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	Kota Bandung	221.927.000	PAD	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	Kota Bandung	1.917.790.443	PAD	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100		5.998.258.266	PAD	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	Kota Bandung	1.928.327.772	PAD	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	Kota Bandung	4.069.930.494	PAD	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di UPTD Laboratorium Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100		313.340.000	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	14	Kota Bandung	313.340.000	PAD	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan UPTD Labkes	persen	92,50		19.647.250.000	PAD	
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar	SPM lingkup pelayanan sesuai standar				19.163.113.000	PAD	
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	unit	1	Kota Bandung	53.100.000	PAD	
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	unit	1	Kota Bandung	25.550.000	PAD	
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	paket	5	Kota Bandung	19.084.463.000	PAD	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan					484.137.000	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
									CAPAIAN KINERJA				
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	1	Kota Bandung	484.137.000	PAD	
UPTD PELATIHAN KESEHATAN											7.435.506.057	PAD	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang di UPELKES	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum	persen	100		6.169.364.077	PAD	
1	02	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Administrasi Kepegawaian UPTD Pelatihan Kesehatan Terpenuhi	persen	100		193.296.000	PAD	
1	02	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	50	Kota Bandung	193.296.000	PAD	
1	02	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi	persen	100		822.803.960	PAD	
1	02	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	Kota Bandung	42.774.516	PAD	
1	02	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	Kota Bandung	155.458.275	PAD	
1	02	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	5	Kota Bandung	278.738.216	PAD	
1	02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	Kota Bandung	140.150.953	PAD	
1	02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	1	Kota Bandung	205.682.000	PAD	
1	02	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Dinas	persen	100		3.036.246.670	PAD	



Uru san	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	1	Kota Bandung	627.300.913	PAD	
1	02	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	1	Kota Bandung	2.408.945.757	PAD	
1	02	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	persen	100		1.929.156.662	PAD	
1	02	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	Kota Bandung	234.821.900	PAD	
1	02	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	Kota Bandung	1.489.643.802	PAD	
1	02	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	Kota Bandung	204.690.960	PAD	
1	02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah di UPTD Pelatihan Kesehatan	Persentase Pemenuhan SPM Penunjang Medik dan Non Medik Sesuai Standar	persen	-		187.860.785	PAD	
1	02	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	Kota Bandung	-	PAD	
1	02	01	1.07	0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	Kota Bandung	187.860.785	PAD	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING
Uru san	Bid ang Uru san	Pro gra m	Kegi atan	Sub Kegi atan					TARGET CAPAIAN KINERJA	LOKASI	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pelatihan Tenaga Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan UPELKES	persen	88,50		424.163.500	PAD	
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan UPTD Pelatihan Kesehatan		unit	1		424.163.500	PAD	
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	unit	1	Kota Bandung	424.163.500	PAD	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki Sertifikat Diklat dengan SKP	persen	100		841.978.480	PAD	
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Tenaga Kesehatan daerah provinsi yang meningkat kapasitasnya	persen	-		841.978.480	PAD	
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	orang	270	Kota Bandung	841.978.480	PAD	



4.3 Pendanaan

Sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berasal dari APBD (PAD dan BLUD) dan APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik, Dana Dekonsentrasi, Dana DBHCHT, Dana Insentif Daerah (DID), serta sumber pendanaan sah lainnya.

Berkenaan dengan sumber pendanaan BLUD, UPTD RS Dinas Kesehatan yang telah berstatus RS dengan manajemen keuangan BLUD sebanyak 6 (enam) RS yaitu RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk, RSUD Jampangkulon, RS Paru Sidawangi, RS Jiwa Provinsi Jawa Barat, dan RSUD Kesehatan Kerja. Estimasi pendapatan BLUD tahun 2024 dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masing-masing rumah sakit dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 4.4 Estimasi SiLPA UOBK

No	Rumah Sakit	Estimasi Pendapatan Tahun 2024	Estimasi SiLPA 2023	SiLPA digunakan TA 2024
1	RSUD Al Ihsan	425.721.649.000	25.435.121.551	66.143.091.839
2	RSUD Jampangkulon	65.808.966.387	11.583.754.537	2.350.000.000
3	RSUD Pameungpeuk	43.566.174.646	12.633.590.085,69	1.613.558.981
4	RS Jiwa	38.419.822.053	12.633.590.085,69	10.056.378.046
5	RS Paru	14.214.795.797	21.237.924.350	24.511.812.622
6	RS kesehatan Kerja	12.129.958.746	N/A	N/A
Total		599.861.366.629,-	83.523.980.609	104.674.841.488

Selain itu pada tahun anggaran 2024, terdapat rencana sumber pembiayaan lain dari Obligasi Syariah yang akan dimanfaatkan oleh Dinas kesehatan untuk pembiayaan pembangunan 3 (tiga) UPTD Rumah Sakit Dinas Kesehatan, yaitu RSUD Al Ihsan, RSUD Pameungpeuk dan RS Paru Sidawangi dengan masing-masing perkiraan pembiayaan sebesar :

Tabel 4.5 Pembiayaan Lain Rumah Sakit

No	Rumah Sakit	Jumlah Pembiayaan
1	RSUD Al Ihsan	Rp. 608.012.521.697
2	RSUD Pameungpeuk	Rp. 150.000.000.000
3	RS Paru Sidawangi	Rp. 140.000.000.000
Total		Rp. 898.012.521.697



BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026, yang menjadi acuan dasar bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta menjalankan urusan kesehatan pemerintah daerah provinsi. Renja Tahun 2024 ini disusun untuk lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat menuju derajat Kesehatan yang optimal.

Sebagai uraian akhir bab penutup Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini disampaikan kaidah pelaksanaan rencana kinerja dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, selanjutnya akan dijadikan bahan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Kesehatan 2024 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dapat menjadikan Renja tersebut sebagai acuan dan arahan peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini akan dijadikan pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2024 sekaligus sebagai dasar laporan Tugas dan Fungsi Organisasi pada tahun yang sama.


KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA BARAT

dr. R. VINI ADIANI DEWI
Pembina Tingkat I
NIP. 197201162002122002



Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat



@dinkesjabar



@dinkesjabarofficial



@dinkesjabar



DINKES PROV JABAR

**Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota
Bandung, Jawa Barat 40171q**